

**IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS TANGGAP BENCANA
(BTB) DALAM PENANGANAN BANJIR DAN LONGSOR
DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh:

DIVIA AINI SYAMSI

NIM: 30622041

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS TANGGAP BENCANA
(BTB) DALAM PENANGANAN BANJIR DAN LONGSOR
DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh:

DIVIA AINI SYAMSI

NIM: 30622041

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Divia Aini Syamsi

NIM : 30622041

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Judul : **IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS TANGGAP
BENCANA (BTB) DALAM PENANGANAN BANJIR DAN
LONGSOR DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 15 April 2026

Yang Menyatakan,



10000
METRKA
TEPE
ACC74AOX06857530

Divia Aini Syamsi
NIM. 30622041

NOTA PEMBIMBING

Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd.
Jalan Pahlawan, KM 05, Rowolaku, Kajen, Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Divia Aini Syamsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Prodi Manajemen Dakwah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Divia Aini Syamsi
NIM : 30622041
Judul : **IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS TANGGAP
BENCANA (BTB) DALAM PENANGANAN BANJIR DAN
LONGSOR DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO
KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Maret 2026
Pembimbing,



Kaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd.
NIP. 198806302019032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : Divia Aini Syamsi

NIM : 30622041

Judul Skripsi : Implementasi Program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)
BAZNAS Kabupaten Pekalongan dalam Penanganan Banjir
dan Longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten
Pekalongan

yang telah diujikan pada Hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos.) dalam Ilmu Manajemen Dakwah.

Dewan Penguji

Penguji I


Prof. Dr. H. Inam Kanafi, M.Ag.
NIP. 197511201999031004

Penguji II


Dr. H. Muhammad Azzuhri, Lc., M.A.
NIP. 197801052003121002



9 Juni 2026

Disahkan Oleh

Dekan


Dekan Haryati, M.Ag.
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Śā	s	s (dengan titik diatasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā	h	h (dengan titik di
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dād	d	d (dengan titik di
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di
ظ	Zā	z	z (dengan titik di
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*,

masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, yang telah membukakan jalan dan memudahkan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyusun hingga menuntaskan karya ini. Sungguh, hanya atas izin-Mu penulis dapat melalui setiap proses dan menyelesaikan semuanya.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang tulus yang selalu menyertai setiap langkah penulis. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang engkau curahkan dengan penuh keikhlasan demi anak-anakmu, serta doa yang tak pernah putus engkau panjatkan. Terima kasih, karena meskipun perjalanan yang engkau lalui tidaklah mudah, engkau tetap melangkah dengan penuh keteguhan agar gelar sarjana dapat tersemat di belakang nama anakmu. Semoga karya ini menjadi salah satu wujud sederhana dari bakti penulis kepadamu.
3. Kepada kakak pertama dan satu-satunya bagi penulis, terima kasih atas segala dukungan yang selalu engkau berikan, serta kehadiranmu yang membuat penulis tidak pernah merasa kekurangan. Semoga segala kebaikan yang engkau berikan senantiasa dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan.
4. Kepada adik-adik penulis, terima kasih karena telah menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas tawa yang kalian hadirkan di tengah perjalanan penulis dalam menyusun karya ini. Semoga karya ini dapat menjadi motivasi bagi kalian untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana.
5. Kepada keluarga besar penulis, nenek, tante, om, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

6. Kepada Ibu Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd., selaku dosen pembimbing penulis, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk membimbing dan mendampingi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala ilmu, arahan, dan kebaikan yang diberikan menjadi amal yang terus mengalir.
7. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, Aulia, Ana, dan Shofa, terima kasih karena telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan. Selamat atas kelulusan kalian, semoga kebersamaan ini senantiasa dikenang dan tidak pernah terlupakan hingga akhir waktu.
8. Kepada TDP, terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu hadir dan memberikan tawa kepada penulis selama perjalanan ini.
9. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diriku, Divia Aini Syamsi. Terima kasih karena tetap memilih untuk melangkah, bahkan ketika banyak hal terasa tidak pasti dan keraguan datang silih berganti. Namun, pada akhirnya perjalanan ini telah sampai pada garis akhirnya. Satu mimpi telah menemukan ujungnya, kini saatnya memberi ruang bagi mimpi-mimpi yang lain untuk menemukan jalannya. Jangan sampai padam mimpi-mimpi itu, bagaimanapun terjangan realita yang menimpa. Sebab setiap perjuangan berhak menemukan ujungnya.

MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al Insyirah: 5-6)

“Ketiadaan pilihan sering kali menjadi awal hadirnya banyak pilihan.”

(M. Ichsan, M.S.I.)

”Hidup tak tercipta untuk berlomba,
Sebab tak semua langkah akan menapaki jalur yang sama.”



ABSTRAK

Syamsi, Divia Aini, 2026. Implementasi Program Baznas Tanggap Bencana (BTB) BAZNAS Tanggap Bencana dalam Penanganan Banjir dan Longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan membantu masyarakat terdampak melalui pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan serta menganalisis distribusi dana ZIS dalam program tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BTB telah menerapkan fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), meskipun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek perencanaan, BAZNAS telah memiliki perencanaan dalam hal pendanaan melalui program dana respon darurat bencana, meskipun perencanaan operasional belum disusun secara khusus karena bencana terjadi secara mendadak. Sementara itu, pengorganisasian masih berada di bawah Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan dengan dukungan relawan. Pelaksanaan program dilakukan melalui penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat terdampak, sedangkan pengawasan dilakukan melalui dokumentasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, distribusi dana ZIS dalam program BTB telah mencerminkan prinsip good governance, yaitu profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat terdampak bencana.

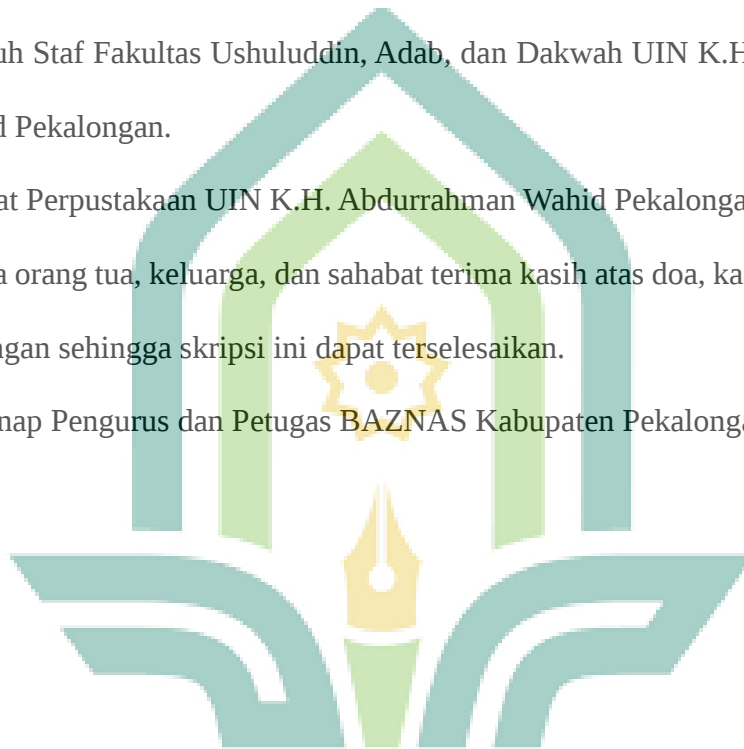
Kata kunci: BAZNAS Tanggap Bencana, ZIS, penanganan bencana, good governance, kemaslahatan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Penulis memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) BAZNAS Kabupaten Pekalongan dalam Penanganan Banjir dan Longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.” Dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa bimbingan, dukungan, motivasi, serta bantuan moral, material, dan spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Tri Astutik Haryati, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Hanif Ardiansyah, M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Ahmad Hidayatullah, M. Sos. selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah
5. Ibu Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Manajemen Dakwah, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
7. Seluruh Staf Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Pejabat Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Kedua orang tua, keluarga, dan sahabat terima kasih atas doa, kasih sayang serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Pengurus dan Petugas BAZNAS Kabupaten Pekalongan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Berpikir	20
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II MANAJEMEN BAZNAS TERHADAP RESPONS BENCANA.	32
A. Manajemen BAZNAS	32
B. Respons Bencana.....	44
BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS TANGGAP BENCANA (BTB) BAZNAS KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENANGANAN BANJIR DAN LONGSOR DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN.....	53
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Pekalongan	53
B. Implementasi Program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam Penanganan Banjir dan Longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan	58

C. Distribusi Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dalam Penanganan Banjir dan Longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan	62
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS TANGGAP BENCANA (BTB) DALAM PENANGANAN BANJIR DAN LONGSOR DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN ..	66
A. Analisis Implementasi Program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam Penanganan Banjir dan Longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan	66
B. Analisis Distribusi Dana ZIS dalam Program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) untuk Penanganan Banjir dan Longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.....	75
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan kondisi geografis dan biologis yang membuatnya rentan terhadap berbagai bencana, baik yang berasal dari aktivitas manusia maupun faktor alam. Berbagai bencana sering terjadi di berbagai daerah, termasuk gempa bumi, longsor, angin kencang (puting beliung), luapan air (banjir), musim kering berkepanjangan (kekeringan), serta peristiwa kebakaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan.¹ Akibat yang terjadi bukan semata-mata berdampak pada manusia, tetapi juga merusak lingkungan. Kondisi ini dapat mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat, serta berpotensi menyebabkan kerugian harta benda.

Bencana alam membawa dampak besar terhadap kehidupan manusia, terutama dalam upaya mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan.² Seperti musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Pekalongan pada hari Senin, bulan Januari 2025 lalu, khususnya di Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, yang merupakan salah satu daerah terdampak paling parah.

Hal ini selaras dengan peran lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga

¹ Trimar Handayani et al., "Strategi Sistem Peringatan Dini Siaga Bencana Banjir Berbasis Masyarakat (Sibat)," *Juru Rawat. Jurnal Update Keperawatan* 3, no. 2 (2023): 21–25, <https://doi.org/10.31983/juk.v3i2.10919.a>

² Adiansyah Amar and Andi Intan Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Bagi Korban Bencana Alam (Studi Kasus Baznas Kabupaten Bantaeng)," *Iqtishaduna* 4, no. 3 (2023): 265–78.

resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam mengelola zakat secara nasional, yang meliputi kegiatan penghimpunan serta pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang berhak menerimanya.³ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, posisi BAZNAS semakin dipertegas sebagai lembaga yang diberikan otoritas penuh dalam penyelenggaraan dan pengelolaan zakat secara komprehensif.⁴ Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan, serta mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan aspek kewilayahan, dengan tetap mengacu pada ketentuan syariat Islam. Di Indonesia, BAZNAS terbagi ke dalam berbagai tingkatan wilayah, termasuk provinsi dan daerah. Salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Pekalongan, sebagai bagian dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. BAZNAS Kabupaten Pekalongan memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mengelola dan mendistribusikan ZIS dengan mengikuti pedoman syariat Islam.

Dengan adanya bencana yang terjadi di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, maka BAZNAS Kabupaten Pekalongan menyusun program layanan sebagai sarana untuk menyalurkan dana kepada masyarakat

³ Wildan Muhammad Nur Ik'hsan and Soni Akhmad Nulhaqim, "Monitoring Dan Evaluasi Btb (Baznas Tanggap Bencana) Dalam Menekan Resiko Keterparahan Kemiskinan Akibat Bencana," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 2 (2022): 199, <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.34154>.

⁴ Nailin Nikmatul Maulidiyah Lailatul Mukarromah, Cici Widya Prasetyandari, Mamluatun Ni'mah, "Dampak Implikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) Pada Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Probolongo." 6 (2023): 101–10.

yang membutuhkan. Program tersebut adalah BAZNAS Tanggap Bencana (BTB). BAZNAS menunjukkan kepedulian terhadap kondisi situasi darurat akibat peristiwa alam di daerah sekitar, termasuk di daerah Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, seperti tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya, melalui program Baznas Tanggap Bencana (BTB). Baznas Tanggap Bencana (BTB) sendiri adalah unit khusus di BAZNAS yang berfokus pada pendistribusian dan pemanfaatan dana ZIS untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.⁵

Program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) adalah sebuah gerakan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat. Program ini diharapkan mampu menjadi inspirasi, mendorong partisipasi, serta membawa manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kepedulian terhadap para penyintas bencana alam. Di samping itu, program ini memiliki tujuan untuk memotivasi lembaga pengelola zakat agar lebih aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.⁶

Pemanfaatan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Melalui strategi pengelolaan dan distribusi yang tepat, dana ZIS dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan darurat, seperti penyediaan bantuan pangan, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, serta pemulihan ekonomi

⁵ Ik'hsan and Nulhaqim, "Monitoring Dan Evaluasi Btb (Baznas Tanggap Bencana) Dalam Menekan Resiko Keterparahan Kemiskinan Akibat Bencana."

⁶ Ashlihah Amin Awal Amarudin , Ichda Choirun Nisak, "Strategi Optimalisasi Fundraising Dan Distribusi Program Jombang Sinergi Tanggap Bencana Di BAZNAS Jombang Untuk Meringankan Korban Bencana Alam," *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah* 5 (2024): 153–69.

pascabencana. Dengan demikian, ZIS berperan dalam meringankan beban korban bencana dan membantu mereka bangkit kembali.⁷

Namun, berdasarkan hasil observasi pra lapangan yang telah dilakukan peneliti, program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) hingga saat ini belum diresmikan secara formal sebagai program wajib oleh seluruh BAZNAS daerah, sehingga menyebabkan tidak semua BAZNAS menjalankan program BTB secara aktif, meskipun semangat kemanusiaan dan partisipasi masyarakat yang dikedepankan oleh program ini sangat relevan dalam konteks penanggulangan bencana.

Selain itu, meskipun program BTB secara khusus merupakan milik BAZNAS, namun lembaga amil zakat lain juga mempunyai program serupa yang bergerak dalam bidang penanganan bencana dengan nama serta struktur yang berbeda. Contohnya adalah kolaborasi antara LAZISMU dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), lembaga yang didirikan oleh Muhammadiyah dan berperan dalam bidang penanggulangan bencana serta aksi-aksi sosial kemanusiaan.⁸ Selain itu, Dompot Dhuafa juga memiliki unit khusus penanggulangan bencana bernama Disaster Management Center (DMC DD). DMC DD merupakan salah satu unsur dari jejaring Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dompot Dhuafa yang telah melewati usia 25

⁷ Ulil Amri Syafri et al., "Konsep Manajemen Keuangan Untuk Pendidikan Islam Berbasis Prinsip ZISWAF," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 3 (2022): 357, <https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i3.8393>.

⁸ Syarifuddin et al., "Strategi Muhammadiyah Disaster Manajement Center (MDMC) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Bima Pada Bulan April Tahun 2021," *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 29–39, <https://doi.org/10.53299/bajpm.v2i1.120>.

tahun dalam berbagai aksi kemanusiaan dan respons bencana.⁹ Namun, fokus utama dalam penelitian ini diarahkan pada pembahasan dan analisis mengenai implementasi program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

Berdasarkan uraian fakta yang telah dijelaskan di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam penanganan banjir dan longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, serta tentang bagaimana distribusi dana ZIS dalam program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) untuk penanganan banjir dan longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Kesimpulan dari uraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) BAZNAS Kabupaten Pekalongan dalam Penanganan Banjir dan Longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam penanganan banjir dan longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana distribusi dana ZIS dalam program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) untuk penanganan banjir dan longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?

⁹ Novia Astri, “Pengaruh Motivasi, Gaya Kepemimpinan, Dan Sistem Remunerasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Disaster Management Center (Dmc) Dompot Dhuafa Jakarta,” *Jurnal ASIK: Jurnal Administrasi, Bisnis, Ilmu Manajemen & Kependidikan* 2, no. 1 (2024): 85–97, <https://doi.org/10.59639/asik.v2i1.57>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam penanganan banjir dan longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana distribusi dana ZIS dalam program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) untuk penanganan banjir dan longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam ranah teoritis, kajian ini ditujukan untuk menambah wawasan dalam kajian mengenai mekanisme pengelolaan dana ZIS dalam situasi darurat bencana, penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian Manajemen Dakwah, terutama pada fokus studi Manajemen ZIS.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai mekanisme pengelolaan dana ZIS dalam situasi darurat bencana. Lebih lanjut, riset ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan pihak-pihak terkait, khususnya kepada muzakki, dan mustahik mengenai proses pengalokasian dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Manajemen ZIS

Manajemen dapat diartikan sebagai proses mengorganisir, mengoordinasikan, dan mengarahkan sumber daya manusia serta peralatan secara efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan. Istilah "manajemen" juga dapat diidentikkan dengan pengelolaan atau pengendalian terhadap suatu sistem atau kegiatan. Banyak orang mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengoordinasian, dan pengawasan dalam suatu organisasi, yang merupakan pemahaman umum saat ini. Manajemen juga kerap dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok individu guna mewujudkan sasaran yang telah disepakati bersama.¹⁰ Menurut George R. Terry, manajemen terdiri atas empat fungsi utama yang dikenal dengan konsep POAC, yaitu *planning* (rencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), serta *controlling* (pengawasan).¹¹

Begitu pula dengan pelaksanaan ZIS wajib mengikuti kaidah-kaidah syariah yang telah ditetapkan, termasuk dalam setiap tahap transaksinya, seperti berikut:

¹⁰ S Rahmida and M Ridwan, "Analisis Pengelolaan Ziswaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dibidang Ekonomi: Studi Kasus Ybm Pln Uid Wilayah Sumatera Utara," *Journal of Economics And* 2, no. 4 (2023).

¹¹ Wijayanti Neri and Wicaksana. Febrian Arif, "Implementasi Fungsi Manajemen George R Terry Dalam Meningkatkan Lembaga Pendidikan," 2023, 30–43, <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.202>.

i. Profesionalisme

ZIS harus dikelola dengan kompetensi tinggi, menerapkan standar manajemen yang optimal, termasuk dalam tahap perencanaan.

ii. Transparansi

Proses ZIS harus dilakukan dengan keterbukaan, memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas serta informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.

iii. Akuntabilitas

Pengelolaan ZIS harus memiliki akuntabilitas yang jelas kepada semua pihak terkait, baik dari segi hukum maupun etika.

iv. Adil

Pendistribusian dan penggunaan ZIS harus dilakukan dengan teratur dan adil, disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas pihak yang berhak menerima manfaat.

v. Kemaslahatan

ZIS harus disalurkan untuk mendukung kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan pembangunan.¹²

Meningkatkan tata kelola yang efektif, meningkatkan kualitas layanan, serta mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik dapat membangun keyakinan dan kesetiaan para muzakki. Satu di antara langkah

¹² Nadine Aurora Raisya, Azizah Fitriani, and Nur Mei Sarah, "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2022): 375–90.

untuk mencapai sistem pengelolaan optimal pada suatu lembaga adalah melalui penerapan asas-asas manajerial yang efektif secara konsisten. Pengelolaan yang baik adalah cara mengatur organisasi dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan secara menyeluruh serta terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan kepercayaan dalam menjalankan fungsi organisasi.¹³

b. Lembaga ZIS Terhadap Kesejahteraan Islam

Kesejahteraan adalah bagian penting dalam hidup, termasuk pada pengaturan sistem pengelolaan ekonomi. Konsep kesejahteraan yang diajarkan bersifat holistik, mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia. Dalam perspektif ajaran agama, kesejahteraan tidak diberikan begitu saja, melainkan bergantung pada kepatuhan manusia dalam menjalankan perintah serta menghindari larangan yang telah ditetapkan.

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan dapat terwujud apabila manfaat dari suatu kebijakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dana ZIS, kesejahteraan tercapai ketika distribusi dan pemanfaatannya mampu memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga lima aspek utama, yaitu keteguhan dalam beragama, keselamatan

¹³ Indra Mualim Hasibuan and Yenni Samri Juliati Nasution, "Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat," *AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management* 2, no. 2 (2024): 118–30, <https://doi.org/10.24260/aktiva.v2i2.2190>.

jiwa, kecerdasan, keberlanjutan kehidupan sosial, serta pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, lembaga ZIS memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara tepat guna untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.¹⁴

Jika dikelola dengan optimal, ZIS dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah membentuk lembaga khusus yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Keberadaan BAZNAS tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Tata Kelola Zakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU tersebut, BAZNAS memiliki tugas utama dalam merencanakan, menghimpun, menyalurkan, serta mengelola pemanfaatan zakat, termasuk dalam hal pelaporan dan akuntabilitas pengelolaannya.¹⁵

Lembaga ZIS memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak dan sedekah. Dengan menerapkan konsep berbagi, lembaga ini dapat mendorong pemerataan kesejahteraan serta membantu pemulihan kondisi sosial dan ekonomi bagi mereka yang terkena dampak bencana. Tujuan dari lembaga ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan

¹⁴ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang ekonomi Islam," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34.

¹⁵ Zaenurrosyid, Hidayatus Sholihah, and Sarjuni, "Ziswaf Penopang Kesejahteraan Masyarakat Lerep Kab. Semarang," *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* 4, no. 2 (2021): 2407–15.

masyarakat terdampak bencana adalah memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam situasi darurat. Dalam jangka panjang, program pemberdayaan yang bersifat produktif juga diterapkan untuk membangun ketahanan ekonomi agar masyarakat dapat bangkit dan mandiri setelah mengalami bencana.¹⁶

c. Respons Bencana

Respons merupakan reaksi yang muncul akibat adanya suatu stimulus. Setiap tindakan atau perubahan yang terjadi sebagai akibat dari rangsangan juga dapat dikategorikan sebagai respons. Selain itu, respons dapat diartikan sebagai kesan atau tanggapan yang terbentuk berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa, atau interaksi. Tanggapan ini dapat diperoleh melalui analisis informasi yang tersedia maupun melalui interpretasi terhadap suatu pesan yang diterima.¹⁷

Sementara itu, respons bencana merupakan upaya bantuan dan tindakan cepat yang dilakukan saat atau sesaat setelah bencana terjadi, dengan tujuan utama menyelamatkan nyawa serta menyediakan kebutuhan dasar bagi para korban yang terdampak. Sebagai langkah antisipasi, diperlukan kesiapan menghadapi bencana melalui berbagai tindakan preventif yang bertujuan untuk mengurangi risiko korban jiwa, cedera, serta kerusakan aset. Persiapan ini mencakup perencanaan layanan

¹⁶ Muhammad Zainudin, "Filantropi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat Melalui Ziswaf," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 4089–4101, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.860>.

¹⁷ M Mahrus Ali, *Respon Masyarakat Menghadapi Resiko Bencana Di Pemukiman Padat Penduduk (Studi Kasus Kelurahan Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya)*, 2020.

penyelamatan, bantuan darurat, hingga rehabilitasi pascabencana. Kesiapan yang difokuskan pada respons awal dan cepat dikenal sebagai "kesiapsiagaan darurat."¹⁸

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dikatakan sebagai berikut, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya" (HR. Ahmad), menekankan urgensi peran individu ketika menolong sesama, terutama dalam situasi darurat. Dalam konteks respons terhadap bencana, hadis ini mendorong umat Muslim untuk berperan aktif dalam aksi kemanusiaan dan solidaritas sosial. Dengan mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, umat Islam dapat menunjukkan komitmennya dalam memberikan manfaat nyata bagi mereka yang membutuhkan.

Adapun beberapa respon bencana yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah maupun lembaga kemanusiaan:

i. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan merupakan rangkaian aktivitas yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya bencana melalui pengelolaan serta penerapan langkah-langkah yang efektif dan efisien.¹⁹ Kegiatan ini mencakup pemahaman terhadap tanda-tanda awal potensi bencana, pengembangan serta uji coba berkala terhadap sistem peringatan dini, dan penyusunan rencana evakuasi

¹⁸ Regional Office for Asia and the Pacific, "Respons Bencana Di Asia Dan Pasifik," n.d.

¹⁹ Nunik Wijayanti Firman Dwi Cahyo, Farly Ihsan, Roulita and Ristina Mirwanti, "KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPA BUMI DALAM KEPERAWATAN: TINJAUAN PENELITIAN," 2023.

maupun langkah-langkah strategis lain yang perlu diterapkan pada masa siaga. Tujuan utama dari kesiapsiagaan adalah untuk menekan risiko korban jiwa serta meminimalkan dampak kerusakan fisik yang mungkin terjadi. Selain itu, kesiapsiagaan juga melibatkan upaya edukasi dan pelatihan bagi masyarakat, aparat, tim penanggulangan, serta para pengambil kebijakan, termasuk penetapan standar pengelolaan logistik dan pemanfaatan anggaran. Dengan demikian, kesiapsiagaan bencana diarahkan untuk mengurangi potensi kerugian melalui respons yang cepat, tepat, efektif, dan efisien.²⁰

ii. Pengkajian Cepat

Pengkajian cepat dalam konteks penanganan bencana merupakan kegiatan pengumpulan serta analisis informasi yang dilakukan secara segera untuk mengetahui kondisi dampak bencana, memetakan kebutuhan utama korban, dan menetapkan langkah-langkah prioritas yang perlu dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan sesaat setelah bencana terjadi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga proses penanganan, pendistribusian bantuan, dan pemanfaatan sumber daya dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan efisien. Selain itu agar dapat menyusun permohonan atau proposal bantuan lanjutan secara lebih terarah.²¹

²⁰ Salsabila Mustika Dewi Faicha Nurhasna, Eli Apud Saepudin, Natasya Revita, Resma Cahya, "Efektivitas Kebijakan Manajemen Bencana Dalam Mengurangi Dampak Sosial Dan Ekonomi" 2, no. 1 (2025): 1984–92.

²¹ Sudirman, "Kaji Cepat Dalam Penanggulangan Bencana," 2024, <https://www.slideshare.net/slideshow/kaji-cepat-dalam-penanggulangan-bencana-copy-pdf/275718686>.

iii. Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, relawan, maupun lembaga terkait pada saat terjadinya bencana dengan tujuan untuk menangani situasi serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Pelaksanaan kegiatan pada fase tanggap darurat didasarkan pada rencana operasi (operational plan), yaitu bentuk implementasi dari rencana kedaruratan atau rencana kontinjensi yang telah dipersiapkan sebelumnya.²²

iv. *Search and Rescue* (SAR)

Search and rescue (SAR) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan korban bencana yang terperangkap atau terpisah, kemudian mengevakuasi mereka ke tempat yang aman serta memberikan pertolongan medis yang dibutuhkan. Saat terjadi banjir, tim SAR umumnya fokus menemukan orang-orang yang terjebak dalam genangan air dan berisiko mengalami bahaya akibat peningkatan volume air. Operasi SAR mencakup tindakan membawa korban ke lokasi yang lebih aman atau memberikan bantuan berupa makanan dan pertolongan pertama sementara sebelum proses evakuasi dapat dilakukan. Setelah terjadinya longsor, upaya SAR umumnya difokuskan pada pencarian dan penyelamatan orang-orang yang tertimbun atau mengalami cedera di bawah material longsor.

²² Syarifuddin et al., “Strategi Muhammadiyah Disaster Manajement Center (MDMC) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Bima Pada Bulan April Tahun 2021.”

v. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (PPE)

Evakuasi merupakan proses menggeser penduduk dari area yang berbahaya menuju tempat yang aman, dengan fokus utama pada menjaga keselamatan jiwa serta memberikan penanganan cepat kepada mereka yang terluka. Evakuasi kerap dilakukan dalam situasi darurat seperti bencana longsor, terutama yang dipicu oleh gempa bumi. Agar proses pemindahan warga dari daerah rawan longsor ke tempat aman berjalan efektif, diperlukan beberapa elemen penting, seperti sistem peringatan dini yang dapat diandalkan, jalur evakuasi yang telah ditentukan dan aman untuk dilalui, informasi lengkap mengenai populasi yang tinggal di wilayah terdampak, serta program penyuluhan kepada masyarakat agar mereka memahami langkah-langkah yang harus diambil saat evakuasi. Selain itu, keberhasilan evakuasi juga bergantung pada adanya aturan resmi yang mewajibkan seluruh warga untuk segera meninggalkan lokasi saat instruksi evakuasi dikeluarkan.

vi. Respon dan Bantuan

Tindakan tanggap darurat dan penyaluran bantuan harus dilakukan tanpa penundaan, karena situasi bencana menuntut respons cepat. Untuk itu, keberadaan rencana cadangan yang telah disiapkan sebelumnya menjadi sangat krusial agar segala upaya dapat segera dijalankan. Bantuan merupakan penyediaan berbagai kebutuhan penting, seperti perlengkapan logistik dan layanan kesehatan, yang ditujukan untuk menyelamatkan nyawa serta memastikan kelangsungan

hidup para penyintas bencana. Bantuan juga berperan penting dalam membantu keluarga-keluarga mencukupi keperluan pokok mereka, seperti hunian sementara, sandang, akses air bersih, pangan, dan layanan kesehatan. Di samping itu, kelompok rentan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, termasuk bayi, ibu yang baru melahirkan, perempuan yang sedang menstruasi, serta lansia perempuan. Pemenuhan kebutuhan pokok juga harus disertai dengan jaminan rasa aman dan lingkungan yang layak, agar para penyintas merasa terlindungi dan tetap nyaman dalam situasi darurat.

vii. Pengkajian untuk rehabilitasi dan rekonstruksi

Beberapa pekan setelah periode kedaruratan selesai, perlu dilakukan evaluasi lanjutan yang lebih komprehensif terhadap situasi masyarakat terdampak. Proses ini bertujuan untuk menggali secara lebih detail apa saja yang dibutuhkan guna memulihkan kehidupan mereka secara menyeluruh. Arah pengkajian kemudian diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penting yang memungkinkan warga terdampak untuk kembali menjalani aktivitas rutin dan membangun kembali kehidupan mereka secara mandiri. Alat yang digunakan dalam proses pengkajian harus mampu menangkap berbagai macam kebutuhan yang kompleks dan berbeda-beda agar perencanaan pemulihan dapat dilakukan secara tepat sasaran.²³

²³ M. Arsyad, *Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Kontruksi*, 2017.

2. Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian sebelumnya dimanfaatkan oleh peneliti sebagai referensi untuk melakukan perbandingan serta menggali ide-ide baru guna mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, studi sebelumnya memberikan landasan bagi penelitian ini dalam menentukan posisinya sekaligus menegaskan orisinalitasnya. Pada sesi ini, peneliti menyajikan sejumlah temuan dari studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji, kemudian menyusun ringkasan dari hasil-hasil tersebut, terlepas dari apakah telah diterbitkan atau belum. Adapun sejumlah studi sebelumnya yang memiliki keterkaitan terhadap topik yang sedang dianalisis oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Rizki Mahendra (2022) ²⁴	Pengelolaan Program BAZNAS Tanggap Bencana oleh BAZNAS Kabupaten Kampar	Hasil penelitian dari M. Rizki Mahendra menunjukkan kemiripan dengan penelitian ini, khususnya dalam mengkaji mengenai program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) sebagai objek kajian.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. M. Rizki Mahendra meneliti pengelolaan program tim BTB di Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian ini difokuskan pada implementasi BTB di

²⁴ M. rizki Mahendra, "Pengelolaan Program Baznas Tanggap Bencana Oleh Baznas Kabupaten Kampar," 2022.

				Kabupaten Pekalongan.
2.	Firdaus Syah Indra Al-Rasyidi (2023) ²⁵	Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Program BAZNAS Tanggap Bencana pada Badan Amil Zakat Nasional Pusat	Kedua penelitian sama- sama membahas tentang program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dan fokus pada aspek pendistribusian dana ZIS.	Hasil penelitian dari Firdaus Syah Indra Al- Rasyidi menekankan pada efektivitas dan capaian pendayagunaan dana ZIS secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada implementasi program BTB dalam penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan.
3.	Toni Adhitya (2021) ²⁶	Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19	Keduanya membahas pendistribusian dana ZISWAF/ZIS dalam konteks penanggulangan kondisi darurat serta bertujuan untuk mengetahui peran dan mekanisme distribusinya kepada	Penelitian yang dilakukan oleh Toni Adhitya berfokus pada penanggulangan pandemi Covid- 19 oleh LAZISNU Kota Kediri, sedangkan penelitian ini membahas penanganan bencana banjir dan longsor oleh BAZNAS

²⁵ Firdaus Syah Indra Al-Rasyidi, *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Baznas Tanggap Bencana Pada Badan Amil Zakat Nasional Pusat, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2023.

²⁶ Toni Adhitya, “Pendistribusian Dana Ziswaf Di Masa Pandemi Covid-19,” *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 1, no. 1 (2021): 68–87, <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i1.64>.

			masyarakat terdampak.	Tanggap Bencana (BTB) di Kabupaten Pekalongan.
4.	Wildan Muhammad Nur Ikhsan dan Soni Akhmad Nulhaqim (2021) ²⁷	Monitoring dan Evaluasi BTB (BAZNAS Tanggap Bencana) dalam Menekan Risiko Keterparahan Kemiskinan Akibat Bencana	Sama-sama meneliti tentang program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam konteks penanganan dampak bencana, serta menggunakan pendekatan kualitatif.	Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Muhammad Nur Ikhsan dan Soni Akhmad Nulhaqim berfokus pada monitoring dan evaluasi BTB dalam menekan risiko kemiskinan akibat bencana secara umum, sementara penelitian ini lebih spesifik membahas implementasi dan distribusi dana ZIS dalam program BTB untuk penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan.
5.	Anisa Febriyani dan Miftahul Huda (2024) ²⁸	Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Bagi Korban Bencana Melalui	Keduanya sama-sama membahas proses pendistribusian dana zakat, infak, dan	Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Febriyani dan Miftahul Huda berfokus pada tahapan distribusi

²⁷ Ik'hsan and Nulhaqim, "Monitoring Dan Evaluasi Btb (Baznas Tanggap Bencana) Dalam Menekan Resiko Keterparahan Kemiskinan Akibat Bencana."

²⁸ Miftahul Huda Anisa Febriyani, "Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Bagi Korban Bencana Melalui Program Tanggap Bencana (Studi Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur)," *Sukkur IBA Journal of Emerging Technologies* 3, no. 2 (2024): 104–9, <https://doi.org/10.30537/sjet.v3i2>.

		Program Tanggap Bencana (Studi pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur)	sedekah (ZIS) melalui program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam merespons bencana.	bantuan (rescue, relief, recovery, reconstruction) yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan penelitian ini membahas implementasi dan distribusi dana ZIS dalam program BTB secara spesifik pada penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan.
--	--	---	---	---

Dari kelima penelitian terdahulu yang telah dikaji, terdapat kesamaan tema yang diangkat, yaitu mengenai program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB). Namun demikian, perbedaan utama terletak pada objek dan fokus penelitian masing-masing. Adapun dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada implementasi Program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam kaitannya dengan penanganan musibah banjir serta longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah landasan dalam penulisan atau penelitian yang dibangun berdasarkan fakta, hasil observasi, serta telaah literatur. Oleh karena

itu, dalam menjalankan penelitian atau menyusun tulisan, seorang peneliti atau penulis perlu merancang kerangka berpikir terlebih dahulu.²⁹

Kerangka berpikir bermanfaat dalam membentuk konsep yang terstruktur, sehingga dapat membantu peneliti dalam menjelaskan permasalahan yang dikaji. Selain itu, kerangka berpikir memungkinkan peneliti untuk menguraikan asal-usul variabel dengan jelas, sehingga tercipta kesamaan pemahaman mengenai alur pemikiran. Dengan demikian, penelitian dapat menghasilkan hipotesis yang logis dan sistematis. Selain itu, kerangka berpikir juga berperan dalam menyederhanakan proses penelitian dengan membantu peneliti menyusun dan menghubungkan setiap bagian yang terdapat dalam studi mengenai Implementasi Program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam Penanganan Banjir dan Longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Dengan adanya kerangka berpikir yang sistematis, penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah dan terstruktur.

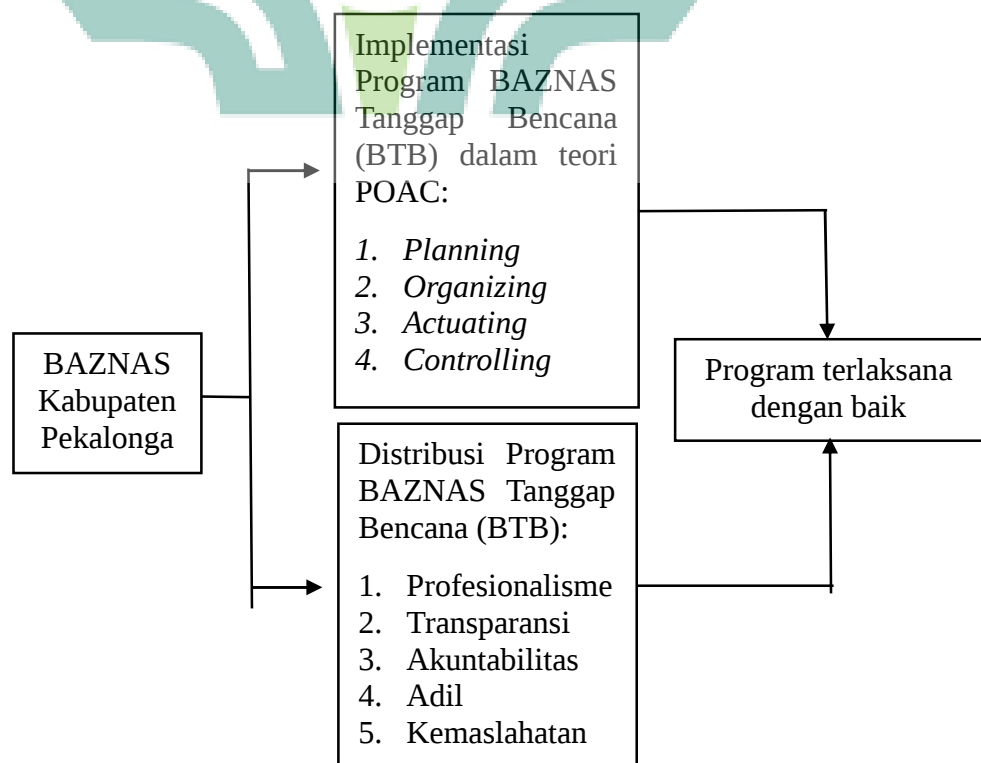
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan ZIS, BAZNAS harus menjalankan tugasnya dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Hal ini menjadi semakin penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan kondisi geografis dan biologis yang atas bencana-bencana yang muncul karena faktor alam ataupun tindakan manusia. Bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, puting beliung, banjir, kekeringan,

²⁹ Haura Hanifah et al., “Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan,” *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 391–404, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.989>.

dan kebakaran sering terjadi di berbagai daerah, menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada kehidupan masyarakat.

Salah satu daerah yang terdampak bencana adalah Kabupaten Pekalongan, yang mengalami banjir dan longsor di beberapa wilayahnya, khususnya di Desa Kasimpar Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Dalam situasi ini, diperlukan upaya penanganan yang efektif, baik dalam pemulihan daerah terdampak maupun bantuan kepada masyarakat yang terkena dampaknya. Untuk itu, BAZNAS memiliki program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) yang bertugas menyalurkan bantuan kepada korban bencana serta mendukung pemulihan pasca-bencana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) BAZNAS Kabupaten Pekalongan dalam penanganan bencana di Kabupaten Pekalongan serta bagaimana distribusi dana ZIS dalam program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)



G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Merujuk pada uraian sebelumnya yang telah dijelaskan, penelitian ini akan menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Adapun maksud dari penelitian ini yakni untuk menggambarkan secara objektif peran BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam penanggulangan banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam mekanisme pengelolaan dan distribusi dana ZIS dalam program BTB, serta bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian ini akan menggali fakta berdasarkan data yang dihimpun langsung dari berbagai pihak yang berhubungan dengan topik, seperti dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak yang terlibat, termasuk pengelola program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB). Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana implementasi dan distribusi dana ZIS dalam program BTB dijalankan oleh BAZNAS sebagai bagian dari strategi penanggulangan bencana.³⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yakni metode penelitian yang menelusuri suatu fenomena atau peristiwa secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Pendekatan kualitatif memanfaatkan berbagai sumber data untuk

³⁰ Lexy Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta :Rake Sarasin, 1990) h. 60 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya) h. 6, n.d., 49–57.

mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada analisis terhadap kejadian yang telah berlangsung, mengevaluasi pola, mekanisme, serta dampaknya berdasarkan data dan informasi yang tersedia.³¹

Dalam pelaksanaan studi empiris ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif, karena salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data deskriptif. Penelitian kualitatif melibatkan proses reduksi dari data yang didapatkan lewat proses wawancara, pengamatan langsung, ataupun telaah dokumen. Data tersebut kemudian dirangkum dan dipilih untuk dimasukkan ke dalam kategori yang relevan. Pada akhirnya, fokus dari analisis data kualitatif adalah pada penjelasan atau narasi mengenai masalah yang diteliti. Proses penjelasan atau narasi ini disebut dengan deskriptif.³²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung, dimana subjek penelitian menjadi sumber utama informasi.³³ Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui

³¹ Alfreda Larasati Vernanda, Wiedy Murtini, and Susantiningrum Susantiningrum, "Customer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Nasabah Selama Pandemi Covid-19 Pada Bank BTN Cabang Surakarta 2021," *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)* 7, no. 4 (2023): 363, <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i4.64247>.

³² Imam Ghozali, "Metode Penelitian," *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Seimbang Dalam Perkawinan Adat Lampung: Studi Di Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*, 2014, 1–86.

³³ Zainal Abidin, "Mencapai Tujuan Pendidikan Islam Di Era Modern Menurut Buku Filsafat Pendidikan Islam Karya Noor Amirudin, M.Pd.I," 2021.

wawancara, dokumentasi, dan kajian terhadap laporan terkait pelaksanaan program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil observasi pra-lapangan, wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pihak BAZNAS yang berperan dalam pengelolaan serta distribusi dana ZIS, yakni Bapak Abdul Aziz sebagai Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan. Metode ini memberi peluang bagi peneliti untuk menggali informasi secara rinci dan bermakna dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program BTB dalam membantu pemulihan pasca-bencana.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh bukan secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui perantara seperti catatan tertulis, laporan, atau keterangan pihak lain. Sumber data sekunder bisa berupa hasil survei, laporan penelitian, dokumen pemerintah, atau publikasi ilmiah yang telah ada sebelumnya. Para peneliti menggunakan data sekunder untuk mendukung atau melengkapi analisis mereka, dan menggali wawasan yang lebih mendalam mengenai isu yang menjadi fokus penelitian. Namun, tetap penting untuk memverifikasi keandalan

dan relevansi data sekunder yang digunakan agar hasil penelitian tetap akurat dan valid.³⁴

Informasi hasil penelusuran sumber data sekunder akan ditafsirkan dan dievaluasi menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Tahap berikutnya, hasil data tersebut akan dideskripsikan untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini.³⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode komunikasi langsung antara dua pihak, yang bertujuan menggali informasi dan pendapat melalui percakapan berbasis pertanyaan dan jawaban, dengan maksud untuk membangun pengetahuan yang lebih terperinci mengenai tema tertentu. Dalam konteks penelitian, wawancara dengan informan dapat dilakukan baik melalui panggilan video maupun tatap muka langsung, yang kemudian dapat menghasilkan komunikasi yang efektif antara peneliti dan informan.

Adapun wawancara terbagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan ketika peneliti

³⁴ Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah," *Jurnal Mahasiswa* 1 (2021): 117–28.

³⁵ CaeciliaJ. J.Waha Cornelius Tangkere Kristian Megahputra Warong, "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapatoleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial," *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): 73–92.

sudah memahami secara jelas jenis data yang ingin diperoleh. Wawancara tidak terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat fleksibel, dimana peneliti tidak terikat pada kerangka pertanyaan yang baku dan sistematis, sehingga memungkinkan eksplorasi informasi secara lebih bebas sesuai dinamika interaksi selama proses wawancara.³⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti berbagai dokumen dan catatan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB). Dokumen yang dianalisis dapat berupa laporan resmi BAZNAS, data pendistribusian dana ZIS, kebijakan terkait penanggulangan bencana, serta berbagai arsip lain yang mendukung penelitian ini. Teknik dokumentasi dimanfaatkan guna menghimpun informasi yang akurat mengenai mekanisme pengelolaan dan distribusi dana ZIS dalam program BTB, serta dampaknya terhadap pemulihan masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan.³⁷

c. Observasi

Pendekatan observasi merupakan suatu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi atau aktivitas subjek yang menjadi fokus penelitian, disertai dengan pencatatan

³⁶ Haslinda Sitti Nuralan, Muh. Khaerul Ummah BK, "Analisis Gaya Belajar Siswa Berprestasi Di SD Negeri 5 Tolitoli," *Pendekar Jurnal: Pengembangan Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar* 1, no. 1 (2022): 5.

³⁷ Rahman Tanjung et al., "Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Glasser* 6, no. 1 (February 10, 2022): 29.

sistematis fenomena yang diamati. Observasi melibatkan kegiatan melihat dan mendokumentasikan secara sistematis fenomena yang sedang diteliti. Observasi tidak semata dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa mencakup bentuk pengamatan tidak langsung. Observasi juga merupakan teknik dalam menghimpun data, di mana peneliti atau asistennya mendokumentasikan temuan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan sepanjang proses penelitian.

Dengan demikian, metode observasi mengacu pada cara pengumpulan Informasi diperoleh dengan mengamati secara langsung kondisi atau kejadian yang sedang berlangsung. Beberapa jenis observasi yang dapat dilakukan meliputi:

- i. Observasi non-partisipan, yang berarti Peneliti bersikap pasif tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati.
- ii. Observasi yang berstruktur, yang berarti peneliti melakukan observasi dengan mengikuti pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu.³⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah aspek penting dalam penelitian, karena tanpa analisis, data yang diperoleh tidak akan memiliki makna. Proses ini mencakup pengorganisasian data, menentukan relevansinya, serta menarik kesimpulan agar informasi yang dihasilkan lebih mudah dipahami. Dari uraian di atas Oleh karena itu, peneliti akan melaksanakan proses analisis yang mencakup:

³⁸ S. U. Hasibuan, M. P., Azmi, R., Arjuna, D. B., & Rahayu, "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi," *GABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 8–15.

a. Reduksi Data

Proses ini bertujuan untuk menyortir data penelitian, merangkum, dan menyoroti informasi yang relevan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Dengan demikian, penelitian diharapkan mampu mengungkap secara jelas tentang temuan yang diperoleh. Dalam tahap reduksi data, peneliti dapat memilih data yang perlu diringkas serta menentukan data yang akan digunakan.

b. Penyajian Data

Setelah melalui tahap reduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi analisis yang sesuai dengan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data dipaparkan melalui penyusunan deskripsi ringkas berdasarkan hasil reduksi data dan hasil wawancara.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah proses reduksi dan penyajian data dilakukan, tahapan akhir dalam penelitian ini adalah menarik simpulan. Kesimpulan data diartikan sebagai penafsiran atau pemaknaan terhadap data.

H. Sistematika Penulisan

Struktur yang akan dicantumkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mencantumkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan.

BAB II : MANAJEMEN BAZNAS TERHADAP RESPONS BENCANA

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan Manajemen BAZNAS, serta Respons Bencana.

BAB III : IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS TANGGAP BENCANA (BTB) DALAM PENANGANAN BANJIR DAN LONGSOR DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan sejarah singkat BAZNAS Kabupaten Pekalongan, visi, misi, dan tujuan program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), Lokasi geografis wilayah terdampak bencana di Kabupaten Pekalongan yaitu Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, serta struktur organisasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS TANGGAP BENCANA (BTB) DALAM PENANGANAN BANJIR DAN LONGSOR DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN

Dalam bab ini penulis akan mencantumkan implementasi program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam penanganan banjir dan longsor di Kecamatan

Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, serta distribusi dana ZIS dalam program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) untuk penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab yang merupakan bab terakhir pada penulisan skripsi, maka penulis akan mencantumkan kesimpulan dan saran.



BAB II

MANAJEMEN BAZNAS TERHADAP RESPONS BENCANA

A. Manajemen BAZNAS

1. Definisi Manajemen

Manajemen dapat diartikan sebagai proses mengorganisir, mengoordinasikan, dan mengarahkan sumber daya manusia serta peralatan secara efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan. Istilah "manajemen" juga dapat diidentikkan dengan pengelolaan atau pengendalian terhadap suatu sistem atau kegiatan. Manajemen juga kerap dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok individu guna mewujudkan sasaran yang telah disepakati bersama.³⁹ Menurut George R. Terry, manajemen terdiri atas empat fungsi utama yang dikenal dengan konsep POAC, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), serta *controlling* (pengawasan).

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dapat dipahami sebagai proses penetapan serangkaian langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan mencakup beberapa kegiatan penting, antara lain merumuskan dan menegaskan sasaran yang hendak dicapai, melakukan proyeksi terhadap kondisi di masa depan,

³⁹ Rahmida and Ridwan, "Analisis Pengelolaan Ziswaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dibidang Ekonomi: Studi Kasus Ybm Pln Uid Wilayah Sumatera Utara."

menyusun kebijakan serta prosedur yang akan diterapkan, serta mengidentifikasi berbagai kemungkinan dan risiko yang dapat terjadi.⁴⁰

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan proses mengoordinasikan dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, hal yang perlu diperhatikan adalah pembagian tugas dan penetapan peran setiap individu sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya (staffing). Peran kepemimpinan seorang pimpinan atau manajer menjadi sangat penting dalam mengarahkan pelaksanaan rencana yang telah disusun. Melalui fungsi pengorganisasian, pemimpin menentukan pembagian kerja secara jelas mengenai siapa melakukan apa agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.⁴¹

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan tahap dalam proses manajemen yang dilaksanakan setelah organisasi menetapkan perencanaan dan menyusun struktur pengorganisasian.⁴² Dengan demikian, pelaksanaan dapat dipahami sebagai tahap implementasi dari perencanaan yang telah disusun, yang diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dalam suatu

⁴⁰ Neri and Arif, "Implementasi Fungsi Manajemen George R Terry Dalam Meningkatkan Lembaga Pendidikan."

⁴¹ Firdaus Jeka et al., "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam" 15, no. 1 (2024): 189–97.

⁴² Amiruddin Siahaan et al., "Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MIN 4 Kota Medan" 19, no. 1 (2024): 1352–58.

organisasi, baik perusahaan maupun lembaga, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan merupakan salah satu fungsi administrasi yang berfokus pada proses membandingkan antara hasil pelaksanaan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara sederhana, fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang direncanakan, termasuk penggunaan sarana serta metode yang diterapkan, berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.⁴³

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Salah satu bentuk penerapan manajemen dalam bidang keagamaan dan sosial dapat diwujudkan melalui pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) sebagai instrumen ibadah yang memiliki fungsi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan umat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS sendiri merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam mengelola zakat secara nasional, yang meliputi kegiatan penghimpunan serta pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh kepada masyarakat yang berhak menerimanya.⁴⁴

⁴³ Nur Baiti and Soiman, "Manajemen Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat Di Kabupaten Langkat" 6, no. 5 (2024): 1744–50.

⁴⁴ Ik'hsan and Nulhaqim, "Monitoring Dan Evaluasi Btb (Baznas Tanggap Bencana) Dalam Menekan Resiko Keterparahan Kemiskinan Akibat Bencana."

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, posisi BAZNAS semakin dipertegas sebagai lembaga yang diberikan otoritas penuh dalam penyelenggaraan dan pengelolaan zakat secara komprehensif.⁴⁵ Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, BAZNAS dituntut untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen yang mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian dalam pengelolaan dana ZIS.⁴⁶

Adapun beberapa program kerja prioritas yang dilaksanakan oleh BAZNAS yaitu:

a. Rumah Sehat BAZNAS

Rumah Sehat BAZNAS merupakan program yang berupaya memperluas dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup 34 provinsi.

b. BAZNAS Microfinance

BAZNAS Microfinance merupakan program yang membantu penerima manfaat dalam membangun kemandirian ekonomi melalui pendapatan yang berkesinambungan.

c. Desa/Kampung Zakat

Desa/Kampung Zakat merupakan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beragam intervensi

⁴⁵Lailatul Mukarromah, Cici Widya Prasetyandari, Mamluatun Ni'mah, "Dampak Implikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) Pada Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Probolinggo."

⁴⁶ A'rasy Fahrullah Labuh Inderayana Eka Sakti, "Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Jombang)" 5 (2022): 106–19.

berbasis zakat, seperti pelatihan keterampilan, dukungan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

d. Santriprenuer

Santripreneur merupakan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis santri yang bertujuan membentuk generasi santri yang produktif, kreatif, berdaya saing, serta mandiri secara ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah.

e. Beasiswa BAZNAS

Beasiswa BAZNAS merupakan program bantuan pendidikan yang terdiri atas enam skema beasiswa bagi generasi muda berprestasi, yaitu Beasiswa Cendekia BAZNAS, Beasiswa Kaderisasi Seribu Ulama, Beasiswa Riset yang berfokus pada kajian tematik ZISWAF, Beasiswa Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Beasiswa Santri, serta Beasiswa Khusus.

f. Z-Chicken

Z-Chicken merupakan program usaha di bidang kuliner yang dikembangkan secara inovatif dengan tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi serta pendapatan mustahik.

g. Z-Mart

Z-Mart merupakan program pendampingan usaha mikro yang dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi para mustahik.

h. Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni merupakan program pembangunan tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan bagi para mustahik.

i. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting merupakan program terfokus yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

j. BAZNAS Tanggap Bencana

BAZNAS Tanggap Bencana merupakan program respons darurat yang memberikan bantuan secara cepat dan tepat kepada masyarakat terdampak bencana.⁴⁷

3. Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)

Zakat merupakan salah satu rukun pokok dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus fungsi sosial bagi umat Muslim. Secara etimologis, istilah zakat berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna perkembangan, kesucian, dan penyucian, yang mencerminkan tujuan zakat dalam membersihkan harta serta menumbuhkan keberkahan. Dalam perspektif ajaran Islam, zakat dipahami sebagai kewajiban mengalokasikan sebagian harta yang dimiliki kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pelaksanaan zakat bertujuan untuk mensucikan kepemilikan harta,

⁴⁷ Badan Amil Zakat Nasional, "Rencana Dan Realisasi Program BAZNAS RI," 2025.

mendorong pemerataan ekonomi, serta berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan umat dan kehidupan sosial masyarakat secara luas.⁴⁸

Adapun Infak merupakan pengeluaran harta yang dilakukan oleh individu maupun lembaga usaha untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sosial dan kemaslahatan umum. Penyaluran infak dilakukan sebagai bentuk pengamalan perintah agama dengan membelanjakan harta di jalan Allah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pada prinsipnya, seluruh harta yang diperoleh secara halal dapat disalurkan melalui infak, baik untuk membantu keluarga maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.⁴⁹

Sedangkan Shodaqoh memiliki cakupan pengertian yang lebih luas. Dalam kajian bahasa Arab, istilah shodaqoh pada konteks tertentu dapat merujuk pada zakat yang bersifat wajib. Namun, berdasarkan pemahaman terminologis dalam perspektif syariat Islam, shodaqoh dipahami sebagai pemberian yang sejalan dengan konsep infak, termasuk seluruh ketentuan dan aturan yang mengaturnya. Shodaqoh dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh individu yang berkecukupan maupun yang memiliki keterbatasan harta. Pelaksanaannya tidak bergantung pada kondisi kelapangan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan dan ketulusan masing-masing dalam berbagi

⁴⁸ Yayat Suharyat Sonia Silastia, Salsabila Rahmadini, Nadya Artha Joecha Mayvea, Abdillah, "Model Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Dalam Pembangunan Suatu Negara" 1, no. 3 (2023): 393–413.

⁴⁹ Nurwani Annisa Zahara, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Dana Sedekah Dompot Dhuafa Waspada Medan," *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* 4 (2023): 1263–78.

sebagian dari apa yang dimiliki. Berbeda dengan zakat, shodaqoh tidak mensyaratkan terpenuhinya batas nisab maupun haul.⁵⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat, infak, dan shodaqoh memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dinilai melalui sejumlah indikator yang digunakan untuk menentukan apakah suatu komunitas telah mencapai kondisi sejahtera atau belum. Salah satu pemikiran yang relevan dalam mengukur kesejahteraan tersebut dikemukakan oleh al-Ghazali, yang merumuskan konsep indikator kesejahteraan berdasarkan kerangka *Maqasid Al-Syari'ah*.⁵¹ *Maqasid Al-Syari'ah* merupakan salah satu konsep utama dalam kajian hukum Islam yang menitikberatkan pada tujuan, nilai kebijaksanaan, serta kemanfaatan yang terkandung dalam setiap penetapan syariat. Secara esensial, konsep ini diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah terjadinya kemudharatan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.⁵²

Para pemikir Islam klasik, seperti al-Ghazali dan al-Syathibi, mengklasifikasikan *Maqasid Al-Syari'ah* ke dalam lima sasaran pokok, yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), yang berfungsi sebagai

⁵⁰ Gandhi Raul Permadi Sabrina Maula Balqis, Arin Setiyowati, Dewi, "Praktik Pengelolaan ZIS (Zakat , Infak , Shodaqoh) Di Berbagai Negara : Studi Literatur," *Jurnal Mas Mansyur*, 2022.

⁵¹ Andira Tsaniya Al-labiyah et al., "Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia" 2, no. 2 (2023): 168–85.

⁵² Suriah Pebriyani, Rahmatiah Hi, and Lomba Sultan, "Logika Maqā'id Al-Syarī ' Ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam" 24, no. 2 (2025): 349–62.

landasan normatif dalam menilai berbagai aktivitas sosial dan kelembagaan agar tidak hanya berorientasi pada kepentingan material semata.⁵³

Sejalan dengan pandangan tersebut, menurut al-Ghazali kesejahteraan dapat terwujud apabila manfaat suatu kebijakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), kesejahteraan tercapai ketika distribusi dan pemanfaatannya mampu memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat.⁵⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga pengelola ZIS memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan secara efektif dan tepat sasaran dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.⁵⁵ Maka dalam praktik pengelolaannya, lembaga pengelola ZIS wajib mengikuti kaidah-kaidah syariah yang telah ditetapkan, termasuk dalam setiap tahap transaksinya, seperti berikut:

a. Profesionalisme

Profesionalisme dapat dimaknai sebagai sikap terbuka dalam menyampaikan informasi yang penting dan relevan serta adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui keterbukaan

⁵³ Aan Jaelani Irsad, Rosdita, Dewi Fatmasari, "Integrasi Maqāḍid Al-Syarī'ah Dalam Pengembangan Industri Halal: Kerangka Perlindungan Konsumen Dan Kesejahteraan Umat," *Al Mudayanah: Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2026): 63–75, <https://doi.org/10.64845/al-mudayanah.v2i1>.

⁵⁴ Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandangekonomi Islam."

⁵⁵ Zaenurrosyid, Sholihah, and Sarjuni, "Ziswaf Penopang Kesejahteraan Masyarakat Lerep Kab. Semarang."

tersebut, kegiatan yang dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi dapat berlangsung secara objektif, bertanggung jawab, dan profesional, sekaligus mampu menjaga serta melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).⁵⁶ Dalam konteks pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), prinsip profesionalisme menuntut agar dana tersebut dikelola dengan tingkat kompetensi yang tinggi serta menerapkan standar manajemen yang optimal, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program.⁵⁷

b. Transparansi

Akuntabilitas merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi mampu mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, setiap kegiatan organisasi harus dikelola secara terukur dan sistematis agar terdapat kesinambungan antara proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, organisasi juga harus mampu memberikan penjelasan kepada para pemangku kepentingan mengenai tindakan yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh. Dengan demikian, akuntabilitas menuntut adanya kejelasan fungsi, tanggung jawab, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan organisasi.⁵⁸

⁵⁶ Eko Sudarmanto et al., *Good Corporate Governance (BCG)* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

⁵⁷ Raisya, Fitriani, and Sarah, "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam."

⁵⁸ Sudarmanto et al., *Good Corporate Governance (BCG)*.

Dalam konteks pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), proses pengelolaan tersebut harus dilakukan secara terbuka dengan memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas serta penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.⁵⁹

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan pada tanggung jawab individu maupun organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan, kebijakan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan kerja di dalam organisasi, tetapi juga mencakup tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas. Dengan demikian, setiap kegiatan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas sebagai bentuk penerapan tata kelola organisasi yang baik serta untuk menjaga keberlanjutan kinerja organisasi dalam jangka panjang.⁶⁰

Dalam konteks pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas kepada seluruh pihak terkait, baik dari aspek hukum maupun etika dalam pengelolaan dan penyalurannya.⁶¹

d. Adil

Prinsip keadilan (*fairness*) dalam tata kelola organisasi menekankan pada perlakuan yang setara dan proporsional bagi setiap pihak yang

⁵⁹ Raisya, Fitriani, and Sarah, "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam."

⁶⁰ Sudarmanto et al., *Good Corporate Governance (BCG)*.

⁶¹ Raisya, Fitriani, and Sarah, "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam."

terlibat, baik anggota organisasi maupun para pemangku kepentingan. Setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk berperan, berkontribusi, serta memperoleh hak sesuai dengan tanggung jawab dan perannya masing-masing. Penerapan prinsip ini penting untuk membangun kepercayaan, menciptakan hubungan yang harmonis, serta mendorong setiap pihak untuk memberikan kontribusi terbaik bagi keberlangsungan organisasi.⁶²

Dalam konteks pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), prinsip keadilan tercermin dalam proses pendistribusian dan pemanfaatan dana yang dilakukan secara tertib dan proporsional, dengan mempertimbangkan kebutuhan serta prioritas pihak-pihak yang berhak menerima manfaat.

e. Kemaslahatan

ZIS harus disalurkan untuk mendukung kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan pembangunan.⁶³

Meningkatkan tata kelola yang efektif, meningkatkan kualitas layanan, serta mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik dapat membangun keyakinan dan kesetiaan para muzakki. Satu di antara langkah untuk mencapai sistem pengelolaan optimal pada suatu lembaga adalah melalui penerapan asas-asas manajerial yang efektif secara konsisten. Pengelolaan yang baik adalah cara mengatur organisasi dengan

⁶² Sudarmanto et al., *Good Corporate Governance (BCG)*.

⁶³ Raisya, Fitriani, and Sarah, "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam."

menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan secara menyeluruh serta terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan kepercayaan dalam menjalankan fungsi organisasi.⁶⁴

B. Respons Bencana

1. Definisi Respons

Respons merupakan reaksi yang muncul akibat adanya suatu stimulus. Setiap tindakan atau perubahan yang terjadi sebagai akibat dari rangsangan juga dapat dikategorikan sebagai respons. Selain itu, respons dapat diartikan sebagai kesan atau tanggapan yang terbentuk berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa, atau interaksi. Tanggapan ini dapat diperoleh melalui analisis informasi yang tersedia maupun melalui interpretasi terhadap suatu pesan yang diterima.⁶⁵

Sementara itu, respons bencana merupakan upaya bantuan dan tindakan cepat yang dilakukan saat atau sesaat setelah bencana terjadi, dengan tujuan utama menyelamatkan nyawa serta menyediakan kebutuhan dasar bagi para korban yang terdampak. Sebagai langkah antisipasi, diperlukan kesiapan menghadapi bencana melalui berbagai tindakan preventif yang bertujuan untuk mengurangi risiko korban jiwa, cedera, serta kerusakan aset. Persiapan ini mencakup perencanaan layanan penyelamatan, bantuan darurat, hingga rehabilitasi pascabencana.⁶⁶

⁶⁴ Hasibuan and Juliati Nasution, "Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat."

⁶⁵ Ali, *Respon Masyarakat Menghadapi Resiko Bencana Di Pemukiman Padat Penduduk (Studi Kasus Kelurahan Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya)*.

⁶⁶ Pacific, "Respons Bencana Di Asia Dan Pasifik."

Sebagaimana di dalam Hadis dari Ibnu Umar ra, Rasulullah saw, bersabda yang artinya;

"Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia."⁶⁷

menekankan urgensi peran individu ketika menolong sesama, terutama dalam situasi darurat. Dalam konteks respons terhadap bencana, hadis ini mendorong umat Muslim untuk berperan aktif dalam aksi kemanusiaan dan solidaritas sosial. Dengan mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, umat Islam dapat menunjukkan komitmennya dalam memberikan manfaat nyata bagi mereka yang membutuhkan.

2. Tahapan Penanganan Bencana

Berbagai bentuk penanganan bencana yang dilaksanakan secara terstruktur oleh pemerintah maupun organisasi kemanusiaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

a. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan merupakan rangkaian aktivitas yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya bencana melalui pengelolaan serta penerapan langkah-langkah yang efektif dan efisien.⁶⁸ Kegiatan ini mencakup pemahaman terhadap tanda-tanda awal potensi bencana, pengembangan serta uji coba berkala terhadap sistem peringatan dini, dan penyusunan rencana evakuasi maupun

⁶⁷ Muh Fadhil Amirudin, Maulana, and Abdil Munzir, "Peran Wanita Sebagai Sukarelawan Kebencanaan Perspektif Syariat Islam" 2, no. 2 (2025): 446–70, <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i2.2480>.

⁶⁸ Firman Dwi Cahyo, Farly Ihsan, Roulita and Mirwanti, "KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPA BUMI DALAM KEPERAWATAN: TINJAUAN PENELITIAN."

langkah-langkah strategis lain yang perlu diterapkan pada masa siaga. Tujuan utama dari kesiapsiagaan adalah untuk menekan risiko korban jiwa serta meminimalkan dampak kerusakan fisik yang mungkin terjadi. Selain itu, kesiapsiagaan juga melibatkan upaya edukasi dan pelatihan bagi masyarakat, aparat, tim penanggulangan, serta para pengambil kebijakan, termasuk penetapan standar pengelolaan logistik dan pemanfaatan anggaran. Dengan demikian, kesiapsiagaan bencana diarahkan untuk mengurangi potensi kerugian melalui respons yang cepat, tepat, efektif, dan efisien.⁶⁹

b. Pengkajian Cepat

Pengkajian cepat dalam konteks penanganan bencana merupakan kegiatan pengumpulan serta analisis informasi yang dilakukan secara segera untuk mengetahui kondisi dampak bencana, memetakan kebutuhan utama korban, dan menetapkan langkah-langkah prioritas yang perlu dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan sesaat setelah bencana terjadi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga proses penanganan, pendistribusian bantuan, dan pemanfaatan sumber daya dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan efisien. Selain itu agar dapat menyusun permohonan atau proposal bantuan lanjutan secara lebih terarah.⁷⁰

⁶⁹ Faicha Nurhasna, Eli Apud Saepudin, Natasya Revita, Resma Cahya, “Efektivitas Kebijakan Manajemen Bencana Dalam Mengurangi Dampak Sosial Dan Ekonomi.”

⁷⁰ Sudirman, “Kaji Cepat Dalam Penanggulangan Bencana.”

Karena itu, alat atau instrumen untuk pengkajian cepat perlu dirancang agar mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi korban, termasuk perbedaan usia, jenis kelamin, kondisi fisik, serta kebutuhan-kebutuhan khusus yang mereka miliki. Pengkajian cepat umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator seperti banyaknya korban jiwa maupun yang mengalami cedera, seberapa parah kerusakan pada infrastruktur, terganggunya layanan-layanan dasar, luasnya area yang terdampak bencana, serta sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menangani situasi tersebut.⁷¹

c. Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, relawan, maupun lembaga terkait pada saat terjadinya bencana dengan tujuan untuk menangani situasi serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Pelaksanaan kegiatan pada fase tanggap darurat didasarkan pada rencana operasi (operational plan), yaitu bentuk implementasi dari rencana kedaruratan atau rencana kontinjensi yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁷² Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap tanggap darurat bencana meliputi beberapa bentuk tindakan utama, antara lain:

⁷¹ Arsyad, *Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir*.

⁷² Syarifuddin et al., "Strategi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Bima Pada Bulan April Tahun 2021."

i. *Search and Rescue (SAR)*

Search and rescue (SAR) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan korban yang hilang, mengevakuasi masyarakat terdampak bencana, serta memberikan bantuan penyelamatan kepada individu yang berada dalam kondisi darurat atau membahayakan keselamatan.⁷³ Saat terjadi banjir, tim SAR umumnya fokus menemukan orang-orang yang terjebak dalam genangan air dan berisiko mengalami bahaya akibat peningkatan volume air. Operasi SAR mencakup tindakan membawa korban ke lokasi yang lebih aman atau memberikan bantuan berupa makanan dan pertolongan pertama sementara sebelum proses evakuasi dapat dilakukan. Setelah terjadinya longsor, upaya SAR umumnya difokuskan pada pencarian dan penyelamatan orang-orang yang tertimbun atau mengalami cedera di bawah material longsor.⁷⁴

ii. *Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (PPE)*

Evakuasi merupakan proses menggeser penduduk dari area yang berbahaya menuju tempat yang aman, dengan fokus utama pada menjaga keselamatan jiwa serta memberikan penanganan cepat kepada mereka yang terluka. Evakuasi kerap dilakukan dalam situasi darurat seperti bencana longsor, terutama yang dipicu oleh gempa bumi. Agar

⁷³ M Juli Sariyanto, Ani Yumarni, and R Djuniarsono, "Perwujudan Ketertiban Masyarakat Oleh Kepolisian Dalam Penyelamatan Dan Pertolongan Search And Rescue (SAR)" 4 (2025): 4995–5007.

⁷⁴ Arsyad, *Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir*.

proses pemindahan warga dari daerah rawan longsor ke tempat aman berjalan efektif, diperlukan beberapa elemen penting, seperti sistem peringatan dini yang dapat diandalkan, informasi lengkap mengenai populasi yang tinggal di wilayah terdampak, program penyuluhan kepada masyarakat agar mereka memahami langkah-langkah yang harus diambil saat evakuasi, serta jalur evakuasi yang telah ditentukan dan aman untuk dilalui.⁷⁵ Jalur evakuasi berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Keberadaan jalur ini sangat penting agar pada saat kondisi darurat, masyarakat dapat segera menuju lokasi evakuasi dengan cepat melalui rute yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti jalur evakuasi yang benar, risiko bahaya dapat diminimalkan sehingga potensi terjadinya korban jiwa akibat bencana dapat dikurangi.⁷⁶ Selain itu, keberhasilan evakuasi juga bergantung pada adanya aturan resmi yang mewajibkan seluruh warga untuk segera meninggalkan lokasi saat instruksi evakuasi dikeluarkan.

iii. Respon dan Bantuan

Tindakan tanggap darurat dan penyaluran bantuan harus dilakukan tanpa penundaan, karena situasi bencana menuntut respons cepat. Untuk itu, keberadaan rencana cadangan yang telah disiapkan sebelumnya menjadi sangat krusial agar segala upaya dapat segera

⁷⁵ Arsyad.

⁷⁶ Lalu Zulkifli et al., "Sosialisasi Mitigasi Bencana Dan Pemetaan Jalur Evakuasi Untuk Mendukung Desa Sengkol Sebagai Desa Tanggap Bencana," 2022.

dijalankan. Bantuan merupakan penyediaan berbagai kebutuhan penting, seperti perlengkapan logistik dan layanan kesehatan, yang ditujukan untuk menyelamatkan nyawa serta memastikan kelangsungan hidup para penyintas bencana.⁷⁷ Bantuan juga berperan penting dalam membantu keluarga-keluarga mencukupi keperluan pokok mereka, seperti hunian sementara, sandang, akses air bersih, pangan, dan layanan kesehatan. Di samping itu, kelompok rentan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, termasuk bayi, ibu yang baru melahirkan, perempuan yang sedang menstruasi, serta lansia perempuan. Pemenuhan kebutuhan pokok juga harus disertai dengan jaminan rasa aman dan lingkungan yang layak, agar para penyintas merasa terlindungi dan tetap nyaman dalam situasi darurat.⁷⁸

d. Pemulihan Awal

Tahapan pemulihan merupakan salah satu fase penting dalam proses penanganan pascabencana yang berkaitan dengan upaya rehabilitasi kondisi masyarakat. Pada fase ini, perhatian utama diarahkan pada pelaksanaan distribusi bantuan, termasuk kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap bantuan yang disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.⁷⁹ Arah pengkajian kemudian diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penting yang memungkinkan warga terdampak

⁷⁷ Arsyad, *Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir*.

⁷⁸ Harijoko Agung et al., *Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Risiko Bencana Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021).

⁷⁹ Faicha Nurhasna, Eli Apud Saepudin, Natasya Revita, Resma Cahya, "Efektivitas Kebijakan Manajemen Bencana Dalam Mengurangi Dampak Sosial Dan Ekonomi."

untuk kembali menjalani aktivitas rutin dan membangun kembali kehidupan mereka secara mandiri. Alat yang digunakan dalam proses pengkajian harus mampu menangkap berbagai macam kebutuhan yang kompleks dan berbeda-beda agar perencanaan pemulihan dapat dilakukan secara tepat sasaran.⁸⁰

3. Pembiayaan dalam Penanganan Bencana

Pembiayaan dalam penanggulangan bencana adalah penyediaan dan pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk mendukung seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), tanggap darurat, hingga pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).⁸¹ Dana Darurat Bencana dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan penanganan bencana, seperti pelaksanaan operasi penyelamatan, pemberian perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban, serta perbaikan dan pemulihan fasilitas serta infrastruktur vital yang terdampak.⁸²

Pembiayaan penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi dua sumber utama, yakni pendanaan yang berasal dari pemerintah dan pendanaan di luar pemerintah. Sumber pembiayaan pemerintah dialokasikan melalui tiga skema, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk

⁸⁰ Arsyad, *Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir*.

⁸¹ Ramdan Harmain, Berlian Manippo, and Roy Victor Karamoy, "Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dalam Menanggulangi Korban Bencana ALam (KAjian Yuridis Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana)" X, no. 11 (2021): 114–22.

⁸² Dahlanroso Lase, "Analisis Koordinasi Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan Pada Bencana Alam Di Kabupaten Nias" 6, no. 3 (2022): 127–47.

penanganan bencana tingkat nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk bencana pada lingkup provinsi, serta APBD kabupaten/kota untuk bencana yang terjadi di wilayah kabupaten atau kota. Dalam pelaksanaannya, apabila alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bencana, maka pemerintah daerah dapat mengajukan dukungan pendanaan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya penyediaan sumber dana bagi kegiatan penanggulangan bencana.⁸³

Di luar pendanaan yang bersumber dari pemerintah, lembaga pengelola ZIS juga berperan dalam menyediakan pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan bencana. Dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah dimanfaatkan sebagai bentuk optimalisasi sumber keuangan umat agar dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran dalam mewujudkan kemaslahatan umat.⁸⁴

⁸³ Lidya Ariyani, Istijabatul Aliyah, and Tendra Istanabi, "Manajemen Bencana Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu Di Kabupaten Karanganyar Dari Aspek Struktur Pembiayaan" 5 (2023): 87–99.

⁸⁴ Atika Wulandari, "Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Bagi Korban Bencana Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo" 5, no. 1 (2023): 67–80.

BAB III

IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS TANGGAP BENCANA (BTB)

BAZNAS KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENANGANAN

BANJIR DAN LONGSOR DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO

KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Pekalongan

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat mengatur berbagai fungsi dalam sistem pengelolaan zakat secara nasional. Salah satu ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah mekanisme pembentukan kelembagaan BAZNAS di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Dalam hal ini, pendirian BAZNAS daerah dilaksanakan oleh Kementerian Agama atas usulan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota. Sementara itu, BAZNAS di tingkat pusat berperan memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap usulan pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang diajukan oleh pemerintah daerah.⁸⁵

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat secara menyeluruh, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi dan pelaporan. Meskipun demikian, dari sisi

⁸⁵ Aulia Ulfah, "Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Bagi Muzakki Berdasarkan Undang-Undang Pasal 22 Nomor 23 Tahun 2011 Di Baznas Kabupaten Pekalongan," 2021.

kelembagaan, BAZNAS di tingkat pusat memiliki susunan organisasi yang berdiri sendiri dan terpisah dari BAZNAS di tingkat daerah. BAZNAS di tingkat pusat yang berkedudukan di ibu kota negara berperan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi dan konsultasi. Namun demikian, BAZNAS pusat tidak memiliki kewenangan struktural yang bersifat hierarkis maupun wewenang instruktif terhadap BAZNAS provinsi maupun BAZNAS kabupaten/kota. Di samping itu, BAZNAS di tingkat pusat memiliki kewajiban untuk menghimpun serta menyusun laporan atas seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh BAZNAS daerah, yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden dan Menteri Agama sebagai bagian dari laporan pengelolaan zakat secara nasional.⁸⁶

Berdasarkan kerangka kelembagaan dan pembagian kewenangan tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan kewenangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat di tingkat daerah.⁸⁷

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan kelembagaan di tingkat daerah, BAZNAS Kabupaten Pekalongan secara resmi dibentuk dan mulai beroperasi pada tanggal 12 Juli 2017 sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat daerah. Pembentukan BAZNAS Kabupaten Pekalongan tersebut ditetapkan oleh

⁸⁶ Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional* (Jakarta, 2021).

⁸⁷ Ulfah, "Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Bagi Muzakki Berdasarkan Undang-Undang Pasal 22 Nomor 23 Tahun 2011 Di Baznas Kabupaten Pekalongan."

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 451.17/289 Tahun 2017 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pekalongan Periode 2017–2022.⁸⁸ Dengan adanya keputusan ini, BAZNAS Kabupaten Pekalongan memperoleh legitimasi hukum untuk melaksanakan fungsi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara terstruktur, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Visi dari BAZNAS Kabupaten Pekalongan adalah menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan profesional, amanah, dan transparan. Sedangkan misinya, BAZNAS Kabupaten Pekalongan menetapkan tiga misi utama, yaitu: (1) peningkatan kesadaran untuk berzakat melalui amil zakat. (2) peningkatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Pekalongan sesuai syariah. (3) memaksimalkan program zakat dalam menanggulangi kemiskinan khususnya di Kabupaten Pekalongan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.⁸⁹

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Dalam rangka menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengelola zakat daerah, BAZNAS Kabupaten Pekalongan

⁸⁸ Minhatis Sa'adah Rifqi Hidayatullah, Dwi Septyani, "MES Management Journal" 1 (2022): 1–8.

⁸⁹ Minhatis Sa'adah Rifqi Hidayatullah, Dwi Septyani, "As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal" 1 (2022): 126–32, <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v1i1.13>.

membentuk struktur organisasi yang berfungsi sebagai kerangka kerja dalam pembagian tugas dan wewenang. Berikut adalah susunan kepengurusan yang ada di BAZNAS Kabupaten Pekalongan:

- 
- a. Ketua : H. Muhtarom
 - b. Wakil Ketua : Nashorin
 - c. Satuan Audit Internal : Arino Kelasio
 - d. Unit Pengumpulan Zakat
 - i. Kepala Bagian : Ahmad Rifa'i
 - ii. Staff : Dina Fitriani
 - b. Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - i. Kepala Bagian : Abdul Aziz
 - ii. Staff : Ahmad Zada Naf'an
 - c. Perencanaan, Kenuangan dan Pelaporan
 - i. Kepala Bagian : Lulu' Zakiyah
 - ii. Staff : Syintia Amanda Rhetha
 - d. Administrasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum
 - i. Kepala Bagian : Rohndatul Mutaalimah
 - ii. Staff : Ahmad Abimanyu

4. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi lembaga serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Pekalongan menyusun dan melaksanakan berbagai program kerja yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah:

a. Pemberdayaan Ekonomi

- i. Z-Auto yaitu Pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal/peralatan bengkel motor bagi mustahik.
- ii. Z-Mart yaitu Pemberdayaan dan pendampingan warung mikro.
- iii. Z-Chiken yaitu Usaha ayam krispi.
- iv. Santriprenuer yaitu pemberdayaan lulusan pesantren.

b. Bantuan Sosial dan Kemanusiaan

- i. BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) yaitu Pendistribusian bantuan logistik, makanan, dan lainnya untuk korban bencana.
- ii. Rumah Layah Huni yaitu Program perbaikan rumah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal dan kenyamanan ibadah.

c. Pendidikan dan Dakwah

- i. Kajian Cerdas yaitu program bantuan pendidikan.
- ii. Bantuan untuk guru ngaji/TPQ dan imam Masjid

5. Lokasi BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Kantor BAZNAS Kabupaten Pekalongan berlokasi di Kompleks Masjid Al-Muhtaram, tepatnya di Jalan Krakatau Nomor 1, wilayah Kaje, Kabupaten Pekalongan.

B. Implementasi Program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam Penanganan Banjir dan Longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan

BAZNAS Kabupaten Pekalongan mulai menjalankan perannya sebagai lembaga pengelola zakat daerah sejak resmi ditetapkan pada 12 Juli 2017. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan berbagai program pada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan advokasi, serta kemanusiaan.⁹⁰ Dana yang dihimpun bersumber dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang sebagian pemanfaatannya diarahkan untuk kegiatan sosial dan penanggulangan bencana melalui program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) merupakan unit khusus bantuan sosial milik BAZNAS Kabupaten Pekalongan yang berperan sebagai garda terdepan dalam merespons berbagai kejadian bencana, baik pada skala lokal maupun nasional. Unit ini bertugas melakukan penanganan darurat dengan menyalurkan bantuan logistik, kebutuhan pokok (sembako), serta memberikan dukungan pada tahap pemulihan pascabencana bagi masyarakat terdampak. Dalam pelaksanaan tugasnya, BTB Kabupaten Pekalongan juga membuka akses komunikasi yang mudah melalui berbagai media sosial dan nomor kontak resmi, sehingga memudahkan koordinasi, pelaporan, serta partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.⁹¹

⁹⁰ Zahrotul Jannah, "Strategi Penyaluran Dana Zis Baznas Kabupaten Pekalongan Melalui Program Bantuan Pendidikan," *E-Theses, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*, 2023, 0–15.

⁹¹ Ik'hsan and Nulhaqim, "Monitoring Dan Evaluasi Btb (Baznas Tanggap Bencana) Dalam Menekan Resiko Keterparahan Kemiskinan Akibat Bencana."

Lebih lanjut, pelaksanaan BTB tidak hanya berorientasi pada bantuan darurat semata, Program BTB adalah sebuah gerakan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat. Program ini diharapkan mampu menjadi inspirasi, mendorong partisipasi, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan kepedulian terhadap para penyintas bencana alam. Di samping itu, program ini memiliki tujuan untuk memotivasi lembaga pengelola zakat agar lebih aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, diperoleh informasi bahwa program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) tidak hanya menangani bencana di Kecamatan Petungkriyono pada Januari hingga Februari 2025, tetapi juga merespons berbagai kejadian bencana lain di wilayah Kabupaten Pekalongan, seperti banjir yang terjadi di Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Karanganyar, dan beberapa wilayah lainnya.

“...Pada bulan Januari sampai Februari 2025 lalu, BTB tidak hanya menangani bencana di Petungkriyono saja mbak, tetapi juga bencana banjir yang terjadi di Wonokerto dan di Karanganyar, sama tanggul jebol di daerah Tirta...”⁹³

Selanjutnya, sebelum melakukan penanganan terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Petungkriyono, BAZNAS Tanggap

⁹² Amin Awal Amarudin , Ichda Choirun Nisak, “Strategi Optimalisasi Fundraising Dan Distribusi Program Jombang Sinergi Tanggap Bencana Di BAZNAS Jombang Untuk Meringankan Korban Bencana Alam.”

⁹³ Abdul Aziz, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, wawancara probadi, Pekalongan, 11 Februari 2026.

Bencana (BTB) Kabupaten Pekalongan tidak memiliki perencanaan khusus yang bersifat spesifik, mengingat peristiwa bencana tersebut terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, BTB Kabupaten Pekalongan belum menyusun rencana penanganan khusus sebelum terjadinya bencana tersebut.

“...Karena bencananya kan terjadi mendadak ya, sehingga BTB tidak ada perencanaan khusus terkait penanganan bencana tersebut, jadi begitu mendapat informasi adanya bencana, kami langsung bergerak menyalurkan bantuan...”⁹⁴

Sumber pendanaan dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan berasal dari dana respon darurat bencana yang telah dialokasikan oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan.

“...kalau untuk program, terkait pendanaan yang kami gunakan itu dari dana respon darurat bencana...”⁹⁵

Terkait aspek pengorganisasian dalam pelaksanaan program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) Kabupaten Pekalongan, program ini belum terbentuk secara formal sebagai unit kelembagaan yang berdiri sendiri, sehingga belum memiliki struktur tim yang bersifat tetap. Implementasi kegiatan BTB masih dilaksanakan secara terbatas oleh Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan beserta satu orang staf. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pihak BTB melibatkan relawan dari organisasi sosial keagamaan, seperti Pemuda NU dan Banser, melalui pendekatan personal, tanpa adanya mekanisme koordinasi yang bersifat kelembagaan.

⁹⁴ Abdul Aziz, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, wawancara pribadi, Pekalongan, 11 Februari 2026.

⁹⁵ Abdul Aziz, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, wawancara pribadi, Pekalongan, 14 April 2026.

“...Program BTB ini memang belum diresmikan secara kelembagaan, sehingga belum memiliki struktur tim yang tetap. Saat ini, yang menjalankan program hanya saya bersama satu orang staf di bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Sebenarnya, program BTB pernah dibentuk secara resmi, tapi kemudian dibubarkan. Oleh karena itu, karena belum ada struktur organisasi yang jelas dan keterbatasan sumber daya manusia, saya merekrut beberapa relawan yang sudah berpengalaman dalam penanganan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kami biasanya meminta bantuan kepada Pemuda NU dan Banser, tetapi karena belum ada kerja sama resmi antara organisasi tersebut dengan BAZNAS, maka perekrutan relawan dilakukan secara personal, bukan melalui kelembagaannya...”⁹⁶

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) Kabupaten Pekalongan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak dalam bentuk bahan kebutuhan pokok, seperti beras, telur, minyak goreng, mie instan, gula pasir, dan kebutuhan lainnya. Selain bantuan berupa bahan mentah, BTB juga menyalurkan bantuan makanan siap konsumsi, seperti nasi bungkus. Sebelum proses pendistribusian dilakukan, BTB terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak atau lembaga setempat yang menangani kebencanaan di Kecamatan Petungkriyono, seperti BPBD Kabupaten Pekalongan, PMI, Bagana (Banser Tanggap Bencana), serta organisasi penanggulangan bencana lainnya, untuk memperoleh informasi terkait kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat terdampak. Berdasarkan informasi tersebut, BTB kemudian menyiapkan jenis bantuan yang dinilai paling dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain itu, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM), BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) Kabupaten Pekalongan hanya berfokus pada penyaluran bantuan logistik dan belum terlibat secara langsung dalam aktivitas

⁹⁶ Abdul Aziz, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, wawancara probadi, Pekalongan, 11 Februari 2026.

penanganan bencana di lapangan, seperti proses evakuasi maupun pencarian dan penyelamatan korban.

“...Kalau terkait mekanisme pelaksanaannya kami hanya menyalurkan bantuan berupa logistik saja mbak, kalau ikut serta dalam penanganan seperti evakuasi dan lain-lainnya BTB belum aktif, karena kan kendala dari SDM kami yang kurang ya, sehingga kami hanya fokus pada bantuan logistiknya saja, seperti beras, gula, teh, lilin di karenakan posko pengungsian mati lampu, sehingga kami memberikan bantuan lilin juga...”⁹⁷

Proses pengawasan dalam program ini dilakukan oleh Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan melalui penggunaan dokumentasi visual serta laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan.

“...Untuk pengawasan, saya ikut terjun langsung ke lapangan. Selain itu, kami juga melakukan dokumentasi kegiatan serta menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ)...”⁹⁸

C. Distribusi Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dalam Penanganan Banjir dan Longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan

Dalam penanganan banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) Kabupaten Pekalongan memanfaatkan dana yang berasal dari dana respon darurat bencana yang kemudian dialokasikan untuk pelaksanaan program BTB. Mengingat tidak adanya persiapan atau perencanaan khusus sebelum terjadinya bencana, maka penggunaan dana dilakukan secara situasional sesuai dengan

⁹⁷ Abdul Aziz, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, wawancara probadi, Pekalongan, 11 Februari 2026.

⁹⁸ Abdul Aziz, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, wawancara probadi, Pekalongan, 11 Februari 2026.

kebutuhan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, dalam proses penyaluran bantuan BTB tidak menetapkan skala prioritas penerima, sehingga seluruh masyarakat terdampak memperoleh manfaat dari bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Tanggap Bencana.

“...Karena pada saat situasi bencana kan semua orang mendapatkan musibah ya, sehingga kami dalam menyalurkan bantuan tidak memandang bulu mbak, semua masyarakat terdampak Insyaallah mendapatkan manfaatnya...”⁹⁹

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) Kabupaten Pekalongan tidak memperoleh dukungan pendanaan dari pihak atau lembaga eksternal BAZNAS. Namun demikian, BTB menerima bantuan dalam bentuk logistik berupa bahan kebutuhan pokok (sembako) dari Minan Gonghui Semarang.

“...Dana yang kami gunakan untuk program BTB pada saat itu sepenuhnya berasal dari dana ZIS. Adapun bantuan dari pihak eksternal, kami hanya menerima dukungan dari Minnan Gonghui Semarang dalam bentuk logistik...”¹⁰⁰

Dalam upaya mewujudkan transparansi kelembagaan, BAZNAS menyajikan laporan keuangan secara berkala dalam periode tahunan melalui laman resmi BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Informasi tersebut dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sebagai bentuk akuntabilitas publik.

⁹⁹ Abdul Aziz, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, wawancara probadi, Pekalongan, 11 Februari 2026.

¹⁰⁰ Abdul Aziz, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, wawancara probadi, Pekalongan, 11 Februari 2026.

“...Kalau untuk mencapai transparasi, BAZNAS mengupload laporan keuangan di website resmi BAZNAS Kabupaten Pekalongan...”¹⁰¹

Dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) Kabupaten Pekalongan mengalokasikan dana sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang berasal dari dana respon darurat bencana untuk mendukung pelaksanaan program penanganan bencana. Penggunaan dana tersebut meliputi kebutuhan transportasi seperti bahan bakar kendaraan serta pengisian angin ban menggunakan nitrogen, pengadaan peralatan kebersihan untuk posko pengungsian, perlengkapan atribut atau seragam yang digunakan saat proses penyaluran bantuan, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya selama kegiatan tanggap bencana berlangsung.

“...Pada saat penanganan bencana banjir dan longsor tersebut, kami menggunakan dana sekitar Rp60.000.000 yang berasal dari dana respon darurat bencana yang bersumber dari ZIS. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti bahan bakar kendaraan, pengisian nitrogen pada ban mobil, pengadaan alat kebersihan untuk posko pengungsian, serta perlengkapan yang digunakan saat penyaluran bantuan di lapangan...”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan sekaligus penanggung jawab program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), diketahui bahwa dalam penanganan bencana di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan

¹⁰¹ Abdul Aziz, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, wawancara probadi, Pekalongan, 11 Februari 2026.

¹⁰² Abdul Aziz, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, wawancara probadi, Pekalongan, 14 April 2026.

terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta sarana transportasi yang belum memadai.

“...Kendala yang kami hadapi berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana transportasi yang belum memadai. Oleh karena itu, dalam proses penanganan kami perlu menyewa kendaraan agar dapat menjangkau lokasi bencana, terutama karena kondisi medan yang sulit dilalui pada saat itu...”



BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS TANGGAP BENCANA (BTB) DALAM PENANGANAN BANJIR DAN LONGSOR DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN

A. Analisis Implementasi Program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam Penanganan Banjir dan Longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, peneliti telah melakukan serangkaian wawancara dengan pihak yang berwenang, yaitu Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan sekaligus penanggung jawab atas program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB). Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait mekanisme kerja serta pelaksanaan program BTB dalam merespons bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada Januari 2025.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut, peneliti selanjutnya melakukan analisis untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program BTB dalam penanganan bencana. Analisis ini penting dilakukan guna memberikan gambaran yang sistematis mengenai proses kerja dan manajemen program yang dijalankan.

Selanjutnya, data dan temuan yang diperoleh dianalisis menggunakan teori POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*). Teori ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami proses manajerial yang diterapkan oleh BTB, serta mengidentifikasi bentuk respons kebencanaan yang dilakukan dalam penanganan bencana tersebut. Berikut pemaparan hasil analisis implementasi program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) berdasarkan masing-masing unsur dalam teori POAC.

1. *Planning* (Perencanaan)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, diperoleh informasi bahwa program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pekalongan tidak sempat menyusun perencanaan secara khusus. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi bencana yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga tidak terdapat kesiapan awal dari program BTB dalam merancang perencanaan penanganan bencana secara sistematis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, diperoleh informasi bahwa program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan tidak menyusun perencanaan khusus terkait pelaksanaan penanganan bencana. Hal ini disebabkan oleh karakteristik bencana yang terjadi secara tiba-tiba sehingga

tidak memungkinkan adanya perencanaan operasional yang disusun sebelumnya.

Meskipun demikian, dalam aspek pendanaan, BAZNAS Kabupaten Pekalongan sebenarnya telah memiliki perencanaan melalui program yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu dana respon darurat bencana. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) kemudian mengalokasikan dana sebesar Rp60.000.000 yang bersumber dari dana respon darurat bencana tersebut untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana di lapangan.

Meskipun tidak memiliki perencanaan khusus terkait pelaksanaan penanganan bencana, BTB tetap melakukan koordinasi dengan pihak atau lembaga seperti BPBD Kabupaten Pekalongan, PMI, Bagana (Banser Tanggap Bencana), serta lembaga terkait lainnya yang terlibat langsung dalam penanganan bencana di Kecamatan Petungkriyono. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kebutuhan mendesak masyarakat terdampak selama masa tanggap darurat.

Berdasarkan teori fungsi manajemen POAC, *planning* atau perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan mencakup penentuan strategi, penyusunan program kegiatan, serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan terarah. Dengan adanya perencanaan yang baik, suatu program dapat

dilaksanakan secara sistematis sehingga mampu meminimalkan hambatan serta meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰³

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa proses perencanaan dalam program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) pada penanganan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan telah menunjukkan adanya kesesuaian dengan fungsi *planning* (perencanaan), khususnya dalam aspek pendanaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya alokasi dana yang bersumber dari program dana respon darurat bencana yang telah disiapkan sebelumnya oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan, sehingga kebutuhan pembiayaan dalam kondisi darurat dapat segera dipenuhi.

Namun demikian, perencanaan dalam aspek operasional penanganan bencana belum disusun secara khusus. Kondisi ini disebabkan oleh karakteristik bencana yang terjadi secara mendadak, sehingga tidak memungkinkan adanya perencanaan teknis yang terstruktur sebelum pelaksanaan kegiatan. Akibatnya, pelaksanaan program lebih bersifat situasional dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan darurat di lapangan.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, dalam aspek *organizing*

¹⁰³ Neri and Arif, "Implementasi Fungsi Manajemen George R Terry Dalam Meningkatkan Lembaga Pendidikan."

(pengorganisasian), BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) Kabupaten Pekalongan dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono tidak membentuk struktur organisasi khusus secara formal. Pelaksanaan kegiatan tetap berada di bawah pengelolaan Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan yang sekaligus menangani program BTB. Dengan demikian, tidak terdapat tim atau struktur kepanitiaan tersendiri yang dibentuk secara khusus untuk menangani bencana tersebut.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Pekalongan melakukan perekrutan relawan untuk mendukung kelancaran program. Perekrutan tersebut dilakukan secara personal atau perorangan tanpa melibatkan lembaga eksternal secara kelembagaan di luar BAZNAS. Relawan yang direkrut merupakan individu-individu yang telah memiliki pengalaman dalam kegiatan sosial maupun penanganan bencana, sehingga diharapkan dapat membantu proses distribusi bantuan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan penanganan bencana di lokasi terdampak.

Dalam teori fungsi manajemen POAC, *organizing* atau pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan, pembagian tugas, serta penentuan wewenang dan tanggung jawab kepada individu atau kelompok agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Melalui proses pengorganisasian, setiap pihak yang terlibat dalam suatu

program dapat mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara terkoordinasi.¹⁰⁴

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa fungsi pengorganisasian dalam program BTB belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Dalam perspektif teori POAC, pengorganisasian seharusnya mencakup pembentukan struktur yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, serta penetapan wewenang dan tanggung jawab yang terdefinisi. Tidak adanya pembentukan struktur formal dalam penanganan bencana berpotensi menimbulkan kurangnya kejelasan koordinasi dan pembagian peran di lapangan.

Meskipun demikian, langkah perekrutan relawan secara langsung menunjukkan adanya upaya untuk tetap menjalankan fungsi pengorganisasian secara fleksibel dan adaptif terhadap kondisi darurat. Pengelolaan oleh Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan juga menunjukkan bahwa secara administratif program tetap berada dalam kendali internal BAZNAS. Namun, untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalitas program di masa mendatang, diperlukan pembentukan mekanisme pengorganisasian yang lebih sistematis agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

¹⁰⁴ Jeka et al., "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam."

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan melalui Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bertindak sebagai penanggung jawab program. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS juga melibatkan sejumlah relawan untuk membantu proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Adapun sasaran program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) adalah masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono, khususnya korban yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.

Dalam aspek *actuating* (pelaksanaan), berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) direalisasikan melalui kegiatan penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok, seperti beras, gula, dan mi instan. Selain itu, BTB juga menyalurkan bantuan makanan siap saji dalam bentuk nasi bungkus untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama masa tanggap darurat.

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan mendesak korban bencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan. Dalam kondisi darurat, ketersediaan makanan

menjadi prioritas utama guna menjaga kondisi fisik dan ketahanan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh BTB menunjukkan bahwa aspek pelaksanaan program difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar secara cepat dan langsung.

Selain bantuan logistik, BAZNAS juga melakukan upaya pemulihan pascabencana melalui program bantuan perbaikan rumah layak huni. Meskipun pelaksanaannya belum menjangkau seluruh korban terdampak, program tersebut menunjukkan adanya upaya BAZNAS dalam mendukung proses pemulihan masyarakat pascabencana sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang dimiliki.

Berdasarkan teori POAC, tahap *actuating* (pelaksanaan) merupakan proses menggerakkan seluruh sumber daya yang telah direncanakan dan diorganisasikan agar tujuan program dapat tercapai. Dalam konteks ini, BTB Kabupaten Pekalongan telah menjalankan fungsi pelaksanaan dengan menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak. Selain itu, adanya bantuan perbaikan rumah layak huni menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga mencakup upaya pemulihan pascabencana sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh BAZNAS. Hal tersebut menunjukkan bahwa program tanggap bencana telah direalisasikan dalam kegiatan di lapangan.

4. Controlling (Pengawasan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten

Pekalongan, dalam aspek *controlling* (pengawasan), pelaksanaan program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dilakukan secara langsung oleh Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan program BTB. Dalam prosesnya, pihak tersebut turut terlibat langsung di lapangan dengan mengikuti kegiatan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Keterlibatan langsung ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses distribusi bantuan berjalan sesuai dengan rencana serta tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain pengawasan secara langsung di lapangan, BTB Kabupaten Pekalongan juga melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan setelah pelaksanaan program selesai. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada pihak BAZNAS pusat sebagai bentuk akuntabilitas kelembagaan. Selain itu, laporan kegiatan dan laporan keuangan juga dipublikasikan melalui situs web resmi BAZNAS Kabupaten Pekalongan sebagai upaya mewujudkan transparansi program kepada masyarakat luas.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa fungsi *controlling* (pengawasan) dalam program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) telah dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan langsung di lapangan serta pelaporan administratif setelah kegiatan berlangsung. Dalam perspektif teori POAC, pengawasan memiliki peran penting untuk

memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, serta prosedur yang telah ditetapkan.¹⁰⁵

Keterlibatan langsung pimpinan dalam proses penyaluran bantuan menunjukkan adanya upaya pengawasan yang bersifat partisipatif dan responsif terhadap kondisi di lapangan. Sementara itu, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan publikasi laporan melalui situs resmi lembaga menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program. Dengan demikian, aspek pengawasan dalam program BTB dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik.

B. Analisis Distribusi Dana ZIS dalam Program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) untuk Penanganan Banjir dan Longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan

Setelah menganalisis implementasi program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono menggunakan pendekatan fungsi manajemen POAC, pembahasan selanjutnya difokuskan pada analisis distribusi dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang digunakan dalam program tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan penyaluran dana ZIS dalam program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dilaksanakan serta sejauh mana distribusi dana tersebut telah dilakukan secara tepat dan akuntabel.

¹⁰⁵ Baiti and Soiman, "Manajemen Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat Di Kabupaten Langkat."

Dalam penelitian ini, analisis distribusi dana ZIS dilakukan dengan menggunakan perspektif *good governance*. Prinsip *good governance* digunakan untuk menilai pengelolaan dana ZIS dalam program BTB melalui beberapa indikator, yaitu profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta kemaslahatan. Pada aspek kemaslahatan, analisis juga dikaitkan dengan konsep kesejahteraan dalam Islam yang berlandaskan pada prinsip *Maqasid al-Syari'ah*, guna melihat sejauh mana distribusi dana ZIS mampu memberikan manfaat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian pelaksanaan distribusi dana ZIS dalam program BTB dengan prinsip tata kelola yang baik sekaligus nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam.

1. Profesionalisme

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan, pelaksanaan program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono menunjukkan adanya upaya profesionalitas dalam menjalankan program penyaluran bantuan. Meskipun tidak terdapat perencanaan operasional secara khusus akibat bencana yang terjadi secara mendadak, BAZNAS tetap memiliki perencanaan dalam aspek pendanaan melalui program dana respon darurat bencana yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga pihak BAZNAS dapat merespons kondisi darurat dengan segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

Dalam pelaksanaannya, program BTB dikelola oleh Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan yang kemudian merekrut relawan yang telah berpengalaman dalam kegiatan penanganan bencana, seperti dari Pemuda IPNU, Pemuda Muhammadiyah, dan Banser. Perekrutan relawan tersebut dilakukan secara personal guna membantu kelancaran penyaluran bantuan di lokasi terdampak.

Selain itu, sebelum menentukan jenis bantuan yang akan disalurkan, tim BTB terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak yang menangani kebencanaan di Kecamatan Petungkriyono untuk mengetahui kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat terdampak. Berdasarkan informasi tersebut, BTB kemudian menyalurkan bantuan berupa bahan makanan pokok seperti beras, gula, mi instan, serta bantuan lilin untuk penerangan karena kondisi pascabencana yang menyebabkan pemadaman listrik.

Dalam perspektif *good governance*, profesionalisme merupakan prinsip yang menekankan pada kemampuan, keahlian, serta tanggung jawab dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien. Profesionalisme juga tercermin dari kemampuan suatu lembaga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi suatu kondisi atau permasalahan.¹⁰⁶

Berdasarkan hal tersebut, dapat dianalisis bahwa meskipun program BTB belum memiliki struktur organisasi yang formal, upaya koordinasi

¹⁰⁶ Sudarmanto et al., *Good Corporate Governance (BCG)*.

dengan pihak terkait serta perekrutan relawan yang memiliki pengalaman dalam kegiatan penanganan bencana menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip profesionalisme dalam pelaksanaan program penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

2. Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana ZIS pada program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), berdasarkan penjelasan Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pekalongan dalam wawancara yang dilakukan, diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan dana yang dihimpun oleh BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Pekalongan secara rutin mempublikasikan laporan penggunaan dana dalam bentuk laporan tahunan yang diunggah melalui situs resmi BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Selain itu, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) juga menyajikan dokumentasi pelaksanaan program melalui media sosial Instagram serta situs berita resmi BAZNAS Kabupaten Pekalongan.

Publikasi laporan tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengelolaan dan penyaluran dana ZIS yang digunakan dalam berbagai program BAZNAS, termasuk program BAZNAS Tanggap Bencana. Dengan adanya akses terbuka terhadap informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana yang dihimpun dari zakat, infak, dan sedekah dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dalam perspektif *good governance*, transparansi merupakan prinsip yang menekankan pada keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi yang relevan, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada publik mengenai proses pengelolaan sumber daya serta penggunaan dana yang dilakukan oleh suatu organisasi.¹⁰⁷

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa upaya publikasi laporan keuangan melalui situs resmi BAZNAS Kabupaten Pekalongan merupakan bentuk penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana ZIS. Melalui penyampaian informasi yang terbuka kepada masyarakat, BAZNAS memberikan kesempatan kepada publik untuk mengetahui serta memantau proses pengelolaan dan penyaluran dana yang dihimpun. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS sebagai pengelola dana zakat, infak, dan sedekah.

Dengan demikian, langkah publikasi laporan keuangan melalui situs resmi lembaga menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan pada kewajiban suatu lembaga atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan serta penggunaan sumber daya yang dikelola kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip ini menuntut adanya kejelasan mengenai

¹⁰⁷ Sudarmanto et al.

sumber dana, proses pengelolaan, serta hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan secara transparan.¹⁰⁸

Akuntabilitas dalam program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) tercermin dari penggunaan dana yang jelas sumbernya serta adanya pelaporan atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, dana yang digunakan dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan hasil wawancara tambahan, dana respon darurat bencana sebesar Rp60.000.000 merupakan total dana yang digunakan untuk penanganan berbagai kejadian bencana di Kabupaten Pekalongan selama periode Januari–Februari 2025, termasuk Petungkriyono, Kedungwuni, Wonopringgo, Wonokerto, Tirto, dan Siwalan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat mengidentifikasi secara spesifik besaran dana yang dialokasikan khusus untuk penanganan bencana di Kecamatan Petungkriyono.

Selain itu, berdasarkan temuan penelitian, penetapan lokasi penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinasi dengan BPBD dan berbagai relawan kebencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan sasaran bantuan dilakukan berdasarkan informasi lapangan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait, sehingga dapat mendukung prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

¹⁰⁸ Sudarmanto et al.

Untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, BAZNAS menyalurkan bantuan secara langsung ke posko pengungsian yang menjadi pusat penanganan korban bencana. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan sehingga distribusi bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak secara lebih efektif.

Selain dana yang berasal dari ZIS, BTB juga menerima bantuan berupa logistik dari pihak eksternal, yaitu Minnan Gonghui Semarang. Bantuan tersebut disalurkan melalui BAZNAS untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak bencana.

Setelah pelaksanaan program selesai, pihak BAZNAS juga menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan dana yang telah dikelola. Laporan tersebut kemudian menjadi bagian dari laporan tahunan lembaga yang dipublikasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana ZIS dalam program BTB telah menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip akuntabilitas melalui kejelasan sumber dana, mekanisme penentuan sasaran bantuan yang dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait, upaya memastikan ketepatan sasaran distribusi bantuan, pelaporan penggunaan dana, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

4. Adil

Prinsip keadilan dalam distribusi dana ZIS pada program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) tercermin dari tidak adanya perbedaan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, pihak BAZNAS tidak menetapkan kriteria penerima bantuan secara khusus karena seluruh masyarakat di wilayah terdampak mengalami musibah yang sama.

Dalam perspektif *good governance*, prinsip keadilan (*fairness*) menekankan pada perlakuan yang setara dan proporsional kepada seluruh pihak yang berkepentingan tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini mengharuskan suatu lembaga untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak yang sama serta mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.¹⁰⁹

Sejalan dengan prinsip tersebut, bantuan yang diberikan oleh BTB disalurkan kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan dilakukan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS Kabupaten Pekalongan tidak memiliki data spesifik mengenai jumlah korban atau kepala keluarga penerima bantuan karena distribusi bantuan dilakukan melalui posko pengungsian yang dikelola secara bersama dengan berbagai pihak. Kondisi

¹⁰⁹ Sudarmanto et al.

ini menunjukkan bahwa fokus utama BTB pada saat tanggap darurat adalah pemenuhan kebutuhan mendesak korban bencana. Namun demikian, ketiadaan data penerima manfaat secara rinci dapat menjadi keterbatasan dalam proses evaluasi dan pengukuran efektivitas distribusi bantuan.

Dengan demikian, pelaksanaan program BTB dalam penyaluran bantuan telah mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam distribusi dana ZIS kepada masyarakat terdampak bencana.

5. Kemaslahatan

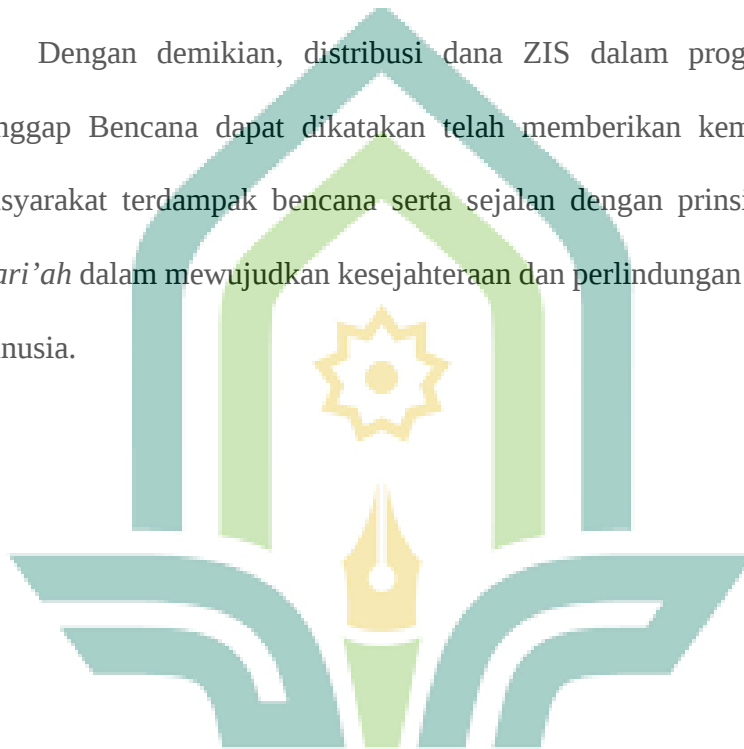
Dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, pengelolaan dan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Salah satu tujuan utama dari *Maqasid al-Syari'ah* adalah menjaga kehidupan manusia (*hifz al-nafs*) serta menjaga kesejahteraan harta (*hifz al-mal*).¹¹⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Nagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam bentuk bahan makanan pokok, makanan siap saji, serta kebutuhan penerangan seperti lilin menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana. Pemenuhan kebutuhan tersebut sangat penting dalam kondisi darurat untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

¹¹⁰ Pebriyani, Hi, and Sultan, "Logika Maqālid Al-Syarī ' Ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam."

Selain itu, penggunaan dana ZIS dalam program tanggap bencana juga menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat dimanfaatkan kembali untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat dalam Islam, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi penderitaan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, distribusi dana ZIS dalam program BAZNAS Tanggap Bencana dapat dikatakan telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat terdampak bencana serta sejalan dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah* dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi kehidupan manusia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan dengan mengacu pada fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Pada aspek *planning* (perencanaan), BAZNAS telah memiliki perencanaan dalam aspek pendanaan melalui program dana respon darurat bencana. Pada aspek *organizing* (pengorganisasian), belum terdapat struktur tim formal sehingga pengelolaan masih berada di bawah Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan dengan dukungan relawan. Pada aspek *actuating* (pelaksanaan), BTB menyalurkan bantuan logistik dan makanan siap saji sesuai kebutuhan masyarakat terdampak, sementara pada aspek *controlling* (pengawasan) dilakukan melalui dokumentasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban. Secara umum, program BTB telah menjalankan fungsi manajemen POAC dengan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pengorganisasian agar pelaksanaan program menjadi lebih terstruktur dan optimal.
2. Distribusi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) pada penanganan banjir dan tanah longsor di

Kecamatan Petungkriyono secara umum telah mencerminkan penerapan prinsip *good governance*. Prinsip profesionalisme terlihat dari upaya koordinasi dengan pihak terkait serta perekrutan relawan yang memiliki pengalaman dalam penanganan bencana. Prinsip transparansi diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat, sedangkan prinsip akuntabilitas tercermin dari kejelasan sumber dana serta adanya laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program. Selain itu, prinsip keadilan tercermin dari penyaluran bantuan yang dilakukan secara merata kepada seluruh masyarakat terdampak. Distribusi dana ZIS tersebut juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat terdampak bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga mencerminkan nilai kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat membentuk struktur organisasi atau tim khusus yang menangani program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) secara lebih formal. Pembentukan tim tersebut penting agar terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan program penanganan bencana.
2. BAZNAS Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat menyusun perencanaan program penanggulangan bencana yang lebih sistematis dan terarah, sehingga pelaksanaan program BTB tidak hanya bersifat reaktif ketika bencana terjadi,

tetapi juga memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. "Mencapai Tujuan Pendidikan Islam Di Era Modern Menurut Buku Filsafat Pendidikan Islam Karya Noor Amirudin, M.Pd.I," 2021.
- Adhitya, Toni. "Pendistribusian Dana Ziswaf Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 1, no. 1 (2021): 68–87. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i1.64>.
- Agung, Harijoko, Diana Puspitasari, Irfani Prabanangrum, and Et Al. *Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Risiko Bencana Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Al-labiyah, Andira Tsaniya, Lusi Nurul Aulia, Najuwa Aurel Annisa, Lili Puspita Sari, and Penulis Korespondensi. "Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia" 2, no. 2 (2023): 168–85.
- Al-Rasyidi, Firdaus Syah Indra. *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Baznas Tanggap Bencana Pada Badan Amil Zakat Nasional Pusat*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2023.
- Ali, M Mahrus. *Respon Masyarakat Menghadapi Resiko Bencana Di Pemukiman Padat Penduduk (Studi Kasus Kelurahan Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya)*, 2020.
- Amar, Adiansyah, and Andi Intan Cahyani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Zakat Bagi Korban Bencana Alam (Studi Kasus Baznas Kabupaten Bantaeng)." *Iqtishaduna* 4, no. 3 (2023): 265–78.
- Amin Awal Amarudin , Ichda Choirun Nisak, Ashlihah. "Strategi Optimalisasi Fundraising Dan Distribusi Program Jombang Sinergi Tanggap Bencana Di BAZNAS Jombang Untuk Meringankan Korban Bencana Alam." *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah* 5 (2024): 153–69.
- Amirudin, Muh Fadhil, Maulana, and Abdil Munzir. "Peran Wanita Sebagai Sukarelawan Kebencanaan Perspektif Syariat Islam" 2, no. 2 (2025): 446–70. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i2.2480>.
- Anisa Febriyani, Miftahul Huda. "Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Bagi Korban Bencana Melalui Program Tanggap Bencana (Studi Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur)." *Sukkur IBA Journal of Emerging Technologies* 3, no. 2 (2024): 104–9. <https://doi.org/10.30537/sjet.v3i2>.

- Annisa Zahara, Nurwani. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Dana Sedekah Dompot Dhuafa Waspada Medan." *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* 4 (2023): 1263–78.
- Ariyani, Lidya, Istijabatul Aliyah, and Tendra Istanabi. "Manajemen Bencana Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu Di Kabupaten Karanganyar Dari Aspek Struktur Pembiayaan" 5 (2023): 87–99.
- Arsyad, M. *Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir*. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Kontruksi, 2017.
- Astri, Novia. "Pengaruh Motivasi, Gaya Kepemimpinan, Dan Sistem Remunerasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Disaster Management Center (Dmc) Dompot Dhuafa Jakarta." *Jurnal ASIK: Jurnal Administrasi, Bisnis, Ilmu Manajemen & Kependidikan* 2, no. 1 (2024): 85–97. <https://doi.org/10.59639/asik.v2i1.57>.
- Badan Amil Zakat Nasional. "Rencana Dan Realisasi Program BAZNAS RI," 2025.
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta, 2021.
- Baiti, Nur, and Soiman. "Manajemen Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat Di Kabupaten Langkat" 6, no. 5 (2024): 1744–50.
- Faicha Nurhasna, Eli Apud Saepudin, Natasya Revita, Resma Cahya, Salsabila Mustika Dewi. "Efektivitas Kebijakan Manajemen Bencana Dalam Mengurangi Dampak Sosial Dan Ekonomi" 2, no. 1 (2025): 1984–92.
- Firman Dwi Cahyo, Farly Ihsan, Roulita, Nunik Wijayanti, and Ristina Mirwanti. "KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPA BUMI DALAM KEPERAWATAN: TINJAUAN PENELITIAN," 2023.
- Handayani, Trimar, Suparjo Suparjo, Nurcholis Nurcholis, Welas Haryati, and Munjiyati Munjiyati. "Strategi Sistem Peringatan Dini Siaga Bencana Banjir Berbasis Masyarakat (Sibat)." *Juru Rawat. Jurnal Update Keperawatan* 3, no. 2 (2023): 21–25. <https://doi.org/10.31983/juk.v3i2.10919>.
- Harmain, Ramdan, Berlian Manippo, and Roy Victor Karamoy. "Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dalam Menanggulangi Korban Bencana Alam (KAjian Yuridis Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana)" X, no. 11 (2021): 114–22.

- Hasibuan, M. P., Azmi, R., Arjuna, D. B., & Rahayu, S. U. "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi." *GABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 8–15.
- Hasibuan, Indra Mualim, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat." *AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management* 2, no. 2 (2024): 118–30. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v2i2.2190>.
- Haura Hanifah, Lathifa Salsabillah, Allisa Tazkia Fitri, Riska Mona Febriani, Rully Hidayatullah, and Harmonedi. "Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan." *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2025): 391–404. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.989>.
- Ik'hsan, Wildan Muhammad Nur, and Soni Akhmad Nulhaqim. "Monitoring Dan Evaluasi Btb (Baznas Tanggap Bencana) Dalam Menekan Resiko Keterparahan Kemiskinan Akibat Bencana." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 2 (2022): 199. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.34154>.
- Imam Ghozali. "Metode Penelitian." *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Seimbangan Dalam Perkawinan Adat Lampung: Studi Di Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*, 2014, 1–86.
- Irsad , Rosdita, Dewi Fatmasari, Aan Jaelani. "Integrasi Maqāḥid Al-Syarī'ah Dalam Pengembangan Industri Halal: Kerangka Perlindungan Konsumen Dan Kesejahteraan Umat." *Al Mudayanah: Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2026): 63–75. <https://doi.org/10.64845/al-mudayanah.v2i1>.
- Jannah, Zahrotul. "Strategi Penyaluran Dana Zis Baznas Kabupaten Pekalongan Melalui Program Bantuan Pendidikan." *E-Theses, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*, 2023, 0–15.
- Jeka, Firdaus, Samsu, Tuti Indriyani, and Asrulla. "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam" 15, no. 1 (2024): 189–97.
- Kristian Megahputra Warong, CaeciliaJ. J.Waha Cornelius Tangkere. "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapatoleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial." *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): 73–92.
- Labuh Inderayana Eka Sakti, A'rasy Fahrullah. "Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Jombang)" 5 (2022): 106–19.

Lailatul Mukarromah, Cici Widya Prasetyandari, Mamluatun Ni'mah, Nailin Nikmatul Maulidiyah. "Dampak Implikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) Pada Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Probolinggo." 6 (2023): 101–10.

Lase, Dahlanroso. "Analisis Koordinasi Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan Pada Bencana Alam Di Kabupaten Nias" 6, no. 3 (2022): 127–47.

Mahendra, M. rizki. "Pengelolaan Program Baznas Tanggap Bencana Oleh Baznas Kabupaten Kampar," 2022.

Moleong, Lexy. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Neong Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta :Rake Sarasin, 1990) h. 60 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya) h. 6, n.d., 49–57.*

Neri, Wijayanti, and Wicaksana. Febrian Arif. "Implementasi Fungsi Manajemen George R Terry Dalam Meningkatkan Lembaga Pendidikan," 2023, 30–43. <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.202>.

Nurjanah. "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah." *Jurnal Mahasiswa* 1 (2021): 117–28.

Pacific, Regional Office for Asia and the. "Respons Bencana Di Asia Dan Pasifik," n.d.

Pebriyani, Suriah, Rahmatiah Hi, and Lomba Sultan. "Logika Maqāḍid Al-Syarī ' Ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam" 24, no. 2 (2025): 349–62.

Rahmida, S, and M Ridwan. "Analisis Pengelolaan Ziswaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dibidang Ekonomi: Studi Kasus Ybm Pln Uid Wilayah Sumatera Utara." *Journal of Economics And* 2, no. 4 (2023).

Raisya, Nadine Aurora, Azizah Fitriani, and Nur Mei Sarah. "Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2022): 375–90.

Rifqi Hidayatullah, Dwi Septyani, Minhatis Sa'adah. "As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal" 1 (2022): 126–32. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v1i1.13>.

———. "MES Management Journal" 1 (2022): 1–8.

- Sabrina Maula Balqis, Arin Setiyowati, Dewi, Gandhi Raul Permadi. “Praktik Pengelolaan ZIS (Zakat , Infaq , Shodaqoh) Di Berbagai Negara : Studi Literatur.” *Jurnal Mas Mansyur*, 2022.
- Sariyanto, M Juli, Ani Yumarni, and R Djuniarsono. “Perwujudan Ketertiban Masyarakat Oleh Kepolisian Dalam Penyelamatan Dan Pertolongan Search And Rescue (SAR)” 4 (2025): 4995–5007.
- Siahaan, Amiruddin, Geniza Aidilla Syuaira, Adinda Julia Putri, Anisah Aruan, and Said Hasan Simanjutak. “Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MIN 4 Kota Medan” 19, no. 1 (2024): 1352–58.
- Sitti Nuralan, Muh. Khaerul Ummah BK, Haslinda. “Analisis Gaya Belajar Siswa Berprestasi Di SD Negeri 5 Tolitoli.” *Pendekar Jurnal: Pengembangan Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar* 1, no. 1 (2022): 5.
- Sonia Silastia, Salsabila Rahmadini, Nadya Artha Joecha Mayvea, Abdillah, Yayat Suharyat. “Model Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Dalam Pembangunan Suatu Negara” 1, no. 3 (2023): 393–413.
- Suardi, Didi. “Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang ekonomi Islam.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34.
- Sudarmanto, Eko, Elly Susanti, Erika Revida, and et al. *Good Corporate Governance (BCG)*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sudirman. “Kaji Cepat Dalam Penanggulangan Bencana,” 2024. <https://www.slideshare.net/slideshow/kaji-cepat-dalam-penanggulangan-bencana-copy-pdf/275718686>.
- Syafri, Ulil Amri, Endin Mujahidin, Abas Mansur Tamam, Rifkah Dewi, Aris Kusnadi, Khoirul Umam, and Salma Evie. “Konsep Manajemen Keuangan Untuk Pendidikan Islam Berbasis Prinsip ZISWAF.” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 3 (2022): 357. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i3.8393>.
- Syarifuddin, Umar, Sukrin, Ihlas, and Ryslan. “Strategi Muhammadiyah Disaster Manajement Center (MDMC) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Bima Pada Bulan April Tahun 2021.” *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 29–39. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v2i1.120>.

- Tanjung, Rahman, Yuli Supriani, Annisa Mayasari, and Opan Arifudin. "Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Glasser* 6, no. 1 (February 10, 2022): 29.
- Ulfah, Aulia. "Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Bagi Muzakki Berdasarkan Undang-Undang Pasal 22 Nomor 23 Tahun 2011 Di Baznas Kabupaten Pekalongan," 2021.
- Vernanda, Alfreda Larasati, Wiedy Murtini, and Susantiningrum Susantiningrum. "Customer Service Dalam Meningkatkan Pelayanan Nasabah Selama Pandemi Covid-19 Pada Bank BTN Cabang Surakarta 2021." *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)* 7, no. 4 (2023): 363. <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i4.64247>.
- Wulandari, Atika. "Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Bagi Korban Bencana Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo" 5, no. 1 (2023): 67–80.
- Zaenurrosyid, Hidayatus Sholihah, and Sarjuni. "Ziswaf Penopang Kesejahteraan Masyarakat Lerep Kab. Semarang." *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* 4, no. 2 (2021): 2407–15.
- Zainudin, Muhammad. "Filantropi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat Melalui Ziswaf." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 4089–4101. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.860>.
- Zulkifli, Lalu, Elma Vanani Emilga, Muh Gibran Abdurrahman, and Lingga Daniswara. "Sosialisasi Mitigasi Bencana Dan Pemetaan Jalur Evakuasi Untuk Mendukung Desa Sengkol Sebagai Desa Tanggap Bencana," 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Divia Aini Syamsi;

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 5 Desember 2004;

Alamat : Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

Email : diviaaini3@gmail.com;

Hobi : Membaca, menulis, mendengarkan musik;

Riwayat Pendidikan : MI Salafiyah Warulor 2010 – 2016;

MTS Salafiyah Wiradesa 2016 – 2019;

MA Hidayatul Athfal 2019 – 2022;

UIN K.H. Abdurrahman Wahid 2022 – 2026.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | email : fuad@uingusdur.ac.id

LEMBAR PEMERIKSAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Rachman, S.Ag
NIP : 197704052003121001
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Divia Aini Syamsi
NIM : 30622041
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Telah selesai melaksanakan pemeriksaan Skripsi sesuai dengan aturan yang disahkan dan diterapkan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Oleh karena itu, untuk selanjutnya skripsi saudara/i segera dijilid sesuai dengan warna fakultas dan kode warna yang ditetapkan oleh STATUTA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Atas perhatian dan kerja sama saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 06 Juli 2026

Mengetahui,

a.n. Dekan

Kabag TU FUAD

Arif Rachman, S.Ag
197704052003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIVIA AINI SYAMSI
NIM : 30622041
Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH
E-mail address : diviaaini3@gmail.com
No. Hp : 081919980933

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **IMPLEMENTASI PROGRAM BAZNAS TANGGAP BENCANA (BTB) BAZNAS KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENANGANAN BANJIR DAN LONGSOR DI KECAMATAN PETUNGKRIYONO KABUPATEN PEKALONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 Juli 2026



DIVIA AINI SYAMSI
NIM. 30622041